

**PENGARUH PEMBERITAAN KASUS DUGAAN KORUPSI E-KTP  
SETYA NOVANTO DI MEDIA TERHADAP TINGKAT  
KEPERCAYAAN PUBLIK PADA DPR-RI**

**(Studi Pada Mahasiswa FISIP Universitas Lampung Angkatan 2016)**

(Skripsi)

Oleh

**ULFAH RAMADHANIA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH PEMBERITAAN KASUS DUGAAN KORUPSI E-KTP SETYA NOVANTO DI MEDIA TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK PADA DPR-RI**

**(Studi Pada Mahasiswa FISIP Universitas Lampung Angkatan 2016)**

**Oleh**

**Ulfah Ramadhania**

Pemberitaan adalah proses pelaporan kepada publik mengenai suatu peristiwa melalui berita, editorial, artikel yang dimuat dalam media massa secara berkelanjutan. Media massa diyakini memiliki kemampuan dalam mempengaruhi pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Kepercayaan terjadi ketika publik menilai lembaga pemerintah dan para pemimpinnya dapat memenuhi janji, efisien, adil, dan jujur. Jika institusi pemerintah, pejabat publik, dan kebijakan yang dibuatnya dinilai baik oleh publik maka publik akan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah. Publik percaya bahwa pemerintah tidak akan berbuat buruk, melainkan akan selalu melakukan tindakan baik meskipun tidak diawasi. Masing-masing variabel memiliki aspek penilaian yang diteliti. Pada variabel X aspek penilaian meliputi durasi, frekuensi, dan kredibilitas sumber. Sedangkan, variabel Y yang menjadi aspek penilaian meliputi integritas, kompetensi, loyalitas (kesetiaan), serta keterbukaan (transparansi).

Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar “pengaruh pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto di media terhadap tingkat kepercayaan publik pada DPR-RI”. Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini menggunakan dua model teori yaitu model teori *Stimulus Organisme Response* (SOR) dan model teori Jarum Suntik. Tipe penelitian kuantitatif, dengan metode survei. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner sebagai data primer dan didukung dengan studi kepustakaan yakni buku dan sumber lainnya dari internet sebagai data sekunder. Teknik penarikan sampel menggunakan *Proportional Stratified Sampling* dengan penentuan besaran sampel yang diambil menggunakan tabel Stephen Isaac & William B. Michael. Populasi penelitian ini sebanyak 609 mahasiswa dengan sampel berjumlah 187 mahasiswa FISIP Universitas Lampung angkatan 2016.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto di media terhadap tingkat kepercayaan publik pada DPR-RI hanya sebesar 4,6%. Berdasarkan perhitungan hasil korelasi, pengaruh tersebut masuk dalam kategori sangat rendah. Hasil uji hipotesis uji F diketahui bahwa  $F_{\text{Hitung}} 9,020 > F_{\text{Tabel}} 3,89$  jadi, keseluruhan variabel mempunyai pengaruh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang artinya “ada pengaruh pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto di media terhadap tingkat kepercayaan publik pada DPR-RI (studi pada mahasiswa FISIP Universitas Lampung angkatan 2016)”.

Kata kunci : Pemberitaan, Media Massa, Kepercayaan Publik

## **ABSTRACT**

### **THE EFFECT OF MEDIA COVERAGE ON ALLEGED ELECTRONIC IDENTITY CARD (E-KTP) CORRUPTION CASE COMMITTED BY SETYA NOVANTO TOWARDS THE LEVEL OF PUBLIC TRUST ON DPR-RI**

*(A Study on Students of Faculty of Social and Political Science of Lampung  
University Batch 2016)*

**By**

**Ulfah Ramadhania**

*Coverage is the process of reporting an event to public by means of media, such as: news, editorial, articles in a newsletter on an ongoing basis. The mass media is believed to have the ability to influence knowledge, attitudes and behavior of the public. Public trust occurs when the public assesses that the government institutions and their leaders can fulfill promises, being efficient, fair and honest. If the government institutions, public officials, and their policies are being considered good by the public, the public will put their high trust in the government. The public believes that the government will not harm the people, but will always perform appropriate actions even if they are not monitored. Each variable has an assessment aspect being studied. In the X variable, the assessment aspect includes the duration, frequency, and credibility of the source. Meanwhile, in the Y variable, the assessment aspect includes integrity, competence, loyalty, and transparency.*

*This research aims at finding out "the effect of media coverage on the alleged electronic identity card (e-KTP) corruption committed by Setya Novanto towards the level of public trust on DPR-RI". The main theories used as the framework of the research were Stimulus Organism Response (SOR) Model and the model theory of hypodermic needle. The data collection technique was carried out through questionnaire as the primary data sources supported with literature study like books and online resources as the secondary data. This research applied quantitative research with survey methods. The sampling technique was done using Proportional Stratified Sampling with determination of sample size taken using table of Stephen Isaac & William B. Michael. The population of the research was 609 University students with the sample consisted of 187 students of Faculty of Social and Political Science of Lampung University Batch 2016. The result of the research showed that the effect of media coverage on the alleged*

*electronic identity card (e-KTP) corruption committed by Setya Novanto towards the level of public trust on DPR-RI was only 4.6%. Based on the calculation of correlation results, this effect fell into very low categories. The results of hypothesis test of F-test showed that  $F\text{-Calc } 9.020 > F\text{-Table } 3.89$  so that the whole variables have an influence. It can be concluded that  $H_0$  was rejected while  $H_a$  was accepted, which means "there was an effect of media coverage on the alleged electronic identity card (e-KTP) corruption committed by Setya Novanto towards the level of public trust on DPR-RI." (A Study on Students of Faculty of Social and Political Science of Lampung University Batch 2016)*

*Keywords: Coverage, Mass Media, Public Trust*

**PENGARUH PEMBERITAAN KASUS DUGAAN KORUPSI E-KTP  
SETYA NOVANTO DI MEDIA TERHADAP TINGKAT  
KEPERCAYAAN PUBLIK PADA DPR-RI**

**(Studi Pada Mahasiswa FISIP Universitas Lampung Angkatan 2016)**

**Oleh**

**ULFAH RAMADHANIA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA ILMU KOMUNIKASI**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Komunikasi**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

**Judul Skripsi** : **PENGARUH PEMBERITAAN KASUS DUGAAN  
KORUPSI E-KTP SETYA NOVANTO DI MEDIA  
TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK  
PADA DPR-RI  
(Studi pada Mahasiswa FISIP Universitas Lampung  
Angkatan 2016)**

**Nama Mahasiswa** : **Ulfah Ramadhania**

**No. Pokok Mahasiswa** : 1416031124

**Jurusan** : Ilmu Komunikasi

**Fakultas** : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing**

**Hestin Oktiani, S.Sos., M.Si.**  
NIP 19781028 200112 2 001

2. **Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dhanik'.

**Dhanik Sulistyarini, S.Sos., MComn&MediaSt.**  
NIP 19760422 200012 2 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Hestin Oktiani, S.Sos., M.Si.**



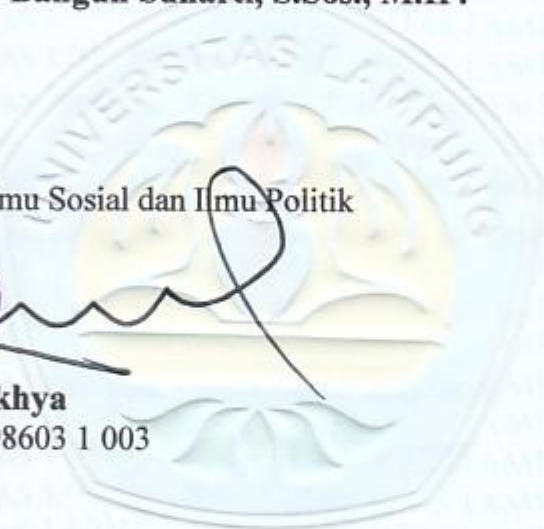
.....

**Penguji Utama : Bangun Suharti, S.Sos., M.IP.**



.....

**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 08 Agustus 2018**



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ulfah Ramadhania  
NPM : 1416031124  
Jurusan : Ilmu Komunikasi  
Alamat Rumah : Jl. Endro Suratmin Gg. Bintara II No. 1 Sukarame Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul **Pengaruh Pemberitaan Kasus Dugaan Korupsi E-KTP Setya Novanto Di Media Terhadap Tingkat Kepercayaan Publik Pada DPR-RI (Studi Pada Mahasiswa FISIP Universitas Lampung Angkatan 2016)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan plagiat (milik orang lain) ataupun dibuatkan oleh orang lain.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian/skripsi saya, ada pihak-pihak yang merasa keberatan maka saya akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak-pihak manapun.

Bandar Lampung, 16 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



**Ulfah Ramadhania**  
**NPM. 1416031124**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ulfah Ramadhania dilahirkan di Palembang pada tanggal 27 Januari 1996. Penulis merupakan putri ke-empat dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Anuar Sanusi dan Ibu Murni. Penulis menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Palembang pada tahun 2002, Sekolah Dasar Negeri 173 Palembang, lalu pada saat kelas 4 (empat) penulis pindah ke Sekolah Dasar Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung dikarenakan mengikuti orang tua dan lulus pada tahun 2008. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bandar Lampung lulus pada tahun 2011 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bandar Lampung lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Semasa menjadi mahasiswa, penulis aktif sebagai anggota HMJ Ilmu Komunikasi di bidang Fotografi periode kepengurusan 2015-2016. Penulis mengabdikan ilmu serta keahlian yang dimiliki kepada masyarakat dengan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Candi Rejo, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah pada periode 2017. Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kompas TV Lampung periode Agustus 2017.

## MOTTO

*“Jika kamu menyanyikan lagu tentang keindahan, walau sendirian di puncak gurun, kamu akan didengari”.*

*(Kahlil Gibran)*

*“Komitmen dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan”.*

*(Ulfah Ramadhania)*

يُسْرًا ۚ

ۚ

۝

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*

*Maka kerjakanlah urusanmu itu sungguh-sungguh.*

*Dan hanya kepada Allah lah kamu berharap”.*

*(QS.Al-Insyirah: 6-8)*

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirabbil'alamiin puji syukur kepada Allah SWT atas segala kesempatan, petunjuk, dan rahmat-Nya sehingga terselesaikan karya tulis ilmiah ini.*

*Karya ini saya persembahkan kepada:*

*Kedua orang tua tercinta,*

*Ayahanda Dr. Anuar Sanusi, S.E., M.Si. dan Ibunda Murni, S.pd.*

*Terima kasih telah membesarkan dan mendidikku dengan segenap kasih sayang, memberiku semangat, bimbingan, nasihat, dan doa yang senantiasa mengiringi langkahku.*

*Untuk kakakku Hardy Atmajaya, ayukku Novita Arsillah dan Meidina Aliyah yang senantiasa memberikan doa dan motivasinya.*

*Untuk seluruh keluarga besarku yang telah menjadi bagian hidup dan keberhasilanku yang turut serta memberikan doa dan dukungannya.*

*Almamaterku tercinta Universitas Lampung.*

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil'alamiin*, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam atas segala limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya yang telah diberikan dan shalawat beriring salam selalu tersanjung agungkan kepada *uswatun hasanah* kita Rasulullah SAW yang selalu dinantikan syafa'atnya di yaumul akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “Pengaruh Pemberitaan Kasus Dugaan Korupsi E-KTP Setya Novanto Di Media Terhadap Tingkat Kepercayaan Publik Pada DPR-RI (Studi Pada Mahasiswa FISIP Universitas Lampung Angkatan 2016)” disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Lampung.

Selama proses penulisan skripsi ini penulis menyadari keterbatasan kemampuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu peneliti banyak memperoleh bimbingan, saran, gagasan dan masukan dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulisan karya ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Dhanik Sulistyarini, S.Sos.,M.Comn&MediaSt., selaku ketua jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

terimakasih atas segala kerja kerasnya untuk kemajuan jurusan Ilmu Komunikasi serta keikhlasannya dalam mendidik dan memberi saran dalam membantu mahasiswa selama ini.

3. Ibu Wulan Suciska, S.I.Kom., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, terimakasih untuk segala keikhlasannya dalam mendidik dan membantu mahasiswa selama ini.
4. Ibu Hestin Oktiani, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas kesediaannya membimbing, meluangkan waktu, memberikan motivasi, saran dan kritik kepada penulis sehingga banyak ilmu dan pengetahuan baru yang didapat selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Bangun Suharti, S.Sos., M.IP. selaku Dosen Pembahas Skripsi yang telah memberikan ilmu, nasihat, saran dan kritik serta meluangkan banyak waktunya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dr. Tina Kartika, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memotivasi dan memberi nasihat kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Seluruh dosen, staff, administrasi dan karyawan FISIP Universitas Lampung, Mas Agus, Mas Hendro, terimakasih banyak sudah membantu mengurus ruangan seminar, Mas Daman dan Mas Hanafi yang telah membantu penulis dalam mengurus surat-menyurat demi kelancaran skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Mama terima kasih atas doa, nasihat, semangat, dorongan moril maupun materil dan semua hal yang tidak kudapatkan tanpa kalian. Untuk Kakakku Hardy, Ayukku Sella dan Dina beserta keluarga besarku, terimakasih untuk keceriaan yang selalu diberikan.

9. Sahabat-sahabatku, Misliani (Amoy), Devi Nindya Oktara, Rabbyatus Shafarani S.H, selalu memberi semangat, menjadi pendengar yang baik dikala penulis lelah dan butuh bantuan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya sampai detik ini untuk selalu menjadi teman curhat, tempat berkeluh kesah, dan teman liburan tergokil.
10. Genk Rusunawa yang selalu dirindukan, teruntuk Mbol, Kumara, Rendy, Bundaku Enin, Nia, Adit, dan Bayu Ardi. Terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan dari awal hingga akhir perkuliahan. Terima kasih telah memberikan kesan terbaik dihidupku, motivasi, keceriaan, canda, tawa, sedih, bahagia, teman curhat ternyaman, semoga persahabatan kita selalu terjaga dan dapat menggapai kesuksesan sesuai dengan yang kita harapkan.
11. Tiga Srikandi Ayu Citra Pertiwi S.I.Kom, Annisa WP S.I.Kom, RT Dwi Septya S.I.Kom, terima kasih sudah menjadi teman menunggu dikala bimbingan, teman makan bareng di kantin Romli, teman pejuang skripsi hingga petang hari tiba. Semoga pertemanan kita selalu terjaga dengan baik.
12. Azizah, Bayu Dirga, Kanzul, Arin, Ismadiyah, Ayu Ika, Puput, Khesy, Muthia Balqis, Kukuh Bangun, Hariska dan teman-teman Ilmu Komunikasi angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu, terimakasih telah belajar bersama selama proses perkuliahan, terimakasih atas canda tawa yang telah diberikan, terima kasih atas doa, bantuan dan dukungannya selama ini, terima kasih telah memberikan hari-hari yang indah selama menempuh perkuliahan di FISIP Universitas Lampung semoga kita semua sukses dunia dan akhirat.

13. Teman-teman KKN terkangen sepanjang masa, teman satu rumah selama 40 hari, Alvin, Debby, Kak Anrifal, dan Hari Mukti, terima kasih atas kerjasamanya, canda tawa, kesal, sedih dan bahagia, tanpa kalian KKN ku tidak berwarna. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjalin.
14. PKL *Squad*, Achmad Kanzulfikar S.I.Kom, Ayu Citra Pertiwi S.I.Kom, Dede Haryanto, Manasye Rendy Juliano, terima kasih atas satu bulan kerja bareng yang berkesan, mulai dari liputan, panas-panasan, liburan, marahan, teman makan yang selalu ngingetin untuk “habisin makanan” hahaha..
15. Terimakasih kepada mahasiswa FISIP Universitas Bandar Lampung dan mahasiswa FISIP Universitas Lampung angkatan 2016 telah bersedia membantu mengisi kuesioner, tanpa kalian penelitian ini tidak akan berjalan.
16. Keluarga Besar Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung, dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu, terimakasih untuk semangat dan bantuan yang telah diberikan.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 16 Agustus 2018

Penulis

**Ulfah Ramadhania**



## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Kegunaan Penelitian .....	9
1.4.1. Secara Teoritis .....	9
1.4.2. Secara Praktis .....	9
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	10
2.2. Pemberitaan Media Massa .....	13
2.3. Aspek Penilaian Pemberitaan di Media Massa .....	15
2.3.1. Kredibilitas Sumber .....	16
2.4. Kriteria Berita Jurnalistik .....	22
2.5. Efek Pesan Media Massa .....	25
2.6. Tinjauan Tentang Persepsi .....	26
2.7. Pengertian Opini Publik .....	28
2.7.1. Proses Pembentukan Opini Publik .....	29
2.8. Media Massa dan Opini Publik .....	31
2.9. Tinjauan Tentang Kepercayaan Publik .....	33
2.10. Faktor Terbentuknya Kepercayaan Publik .....	35
2.11. Pengaruh Media Massa Terhadap Kepercayaan Publik .....	37
2.12. Dimensi Kepercayaan Publik .....	40
2.13. Landasan Teori .....	43
2.14. Kerangka Pikir .....	50
2.15. Hipotesis .....	55

<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
3.1. Tipe Penelitian .....	56
3.2. Metode Penelitian .....	56
3.3. Definisi Konsep .....	57
3.4. Definisi Operasional .....	60
3.5. Populasi .....	62
3.6. Sampel dan Teknik Sampling.....	63
3.6.1 Sampel .....	63
3.5.2 Teknik Sampling .....	63
3.7. Sumber Data .....	65
3.8. Teknik Pengumpulan Data .....	66
3.9. Teknik Pengolahan Data.....	66
3.10. Teknik Pemberian Skor .....	67
3.11. Teknik Pengujian Instrument.....	67
3.11.1 Uji Validitas .....	67
3.11.2 Uji Reliabilitas .....	69
3.12. Teknik Analisis Data .....	70
3.13. Pengujian Hipotesis .....	71
3.13.1. Uji F .....	71
3.13.2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	72
 <b>BAB IV. GAMBARAN UMUM .....</b>	 <b>73</b>
4.1. Gambaran Lokasi Penelitian .....	73
4.1.1 Sejarah FISIP Universitas Lampung .....	73
4.1.2 Filosofi FISIP Universitas Lampung .....	76
4.1.3 Visi, Misi dan Tujuan FISIP Universitas Lampung .....	77
4.1.3.1 Visi FISIP Universitas Lampung .....	77
4.1.3.2 Misi FISIP Universitas Lampung .....	78
4.1.3.3 Tujuan FISIP Universitas Lampung .....	79
4.2. Gambaran Umum E-KTP .....	79
4.2.1 Deskripsi Tentang E-KTP .....	79
4.2.2 Dasar Hukum E-KTP .....	82
4.2.3 Kelebihan E-KTP .....	83
4.2.4 Kekurangan E-KTP .....	84
 <b>BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	 <b>86</b>
5.1. Hasil Penelitian .....	86
5.1.1. Uji Validitas .....	86
5.1.2 Uji Reliabilitas.....	91
5.1.3 Identitas Responden .....	92
5.1.4 Rincian Pengetahuan Responden Mengenai Pemberitaan .....	94
5.1.5 Deskripsi Hasil Penelitian .....	96
5.1.5.1 Variabel X Pemberitaan Kasus dugaan Korupsi E-KTP Setya Novanto di Media .....	96
5.1.5.1.1 Dimensi Durasi .....	96
5.1.5.1.2 Dimensi Frekuensi .....	102
5.1.5.1.3 Dimensi Kredibilitas Sumber .....	112

5.1.5.2 Variabel X Pemberitaan Kasus dugaan Korupsi E-KTP Setya Novanto di Media .....	139
5.1.5.2.1 Dimensi Integritas .....	139
5.1.5.2.2 Dimensi Kompetensi .....	146
5.1.5.2.3 Dimensi Loyalitas (Kesetiaan) .....	158
5.1.5.2.4 Dimensi Keterbukaan (Transparansi) .....	165
5.1.6 Analisis Regresi Linier Sederhana .....	185
5.1.7 Pengujian Hipotesis .....	189
5.2 Pembahasan Penelitian .....	194
5.2.1 Pengaruh Pemberitaan Kasus Dugaan Korupsi E-KTP Setya Novanto di Media Terhadap Tingkat Kepercayaan Publik Pada DPR-RI .....	194
5.2.1.1 Durasi .....	195
5.2.1.2 Frekuensi .....	196
5.2.1.3 Kredibilitas Sumber .....	197
5.2.2.1 Integritas .....	199
5.2.2.2 Kompetensi .....	201
5.2.2.3 Loyalitas .....	204
5.2.2.4 Keterbukaan (Transparansi) .....	207
<b>BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>215</b>
6.1. Kesimpulan .....	215
6.2. Saran .....	216

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Pemberitaan Kasus Dugaan Korupsi E-KTP di Media Periode Bulan Juli s.d Bulan November 2017 pada Portal Berita Kompas.com & Jawapos.com .....	4
2. Data Hasil Lembaga Survei LSI, (LPC&ICW), dan CSIS Terhadap Kepercayaan Publik Pada DPR-RI yang diadopsi dari berbagai sumber .....	7
3. Penelitian Terdahulu, diadopsi dari berbagai sumber .....	12
4. Definisi Operasional Penelitian .....	60
5. Daftar Mahasiswa S1 dan Diploma Universitas Lampung Tahun Akademik 2016/2017 .....	62
6. Rumus Stephen Isaac & William B. Michael .....	64
7. Distribusi Responden Berdasarkan Fakultas .....	65
8. Ikhtisar Uji Validitas Kuesioner .....	87
9. Pengetahuan Responden Mengenai Pemberitaan Kasus Dugaan Korupsi E-KTP Setya Novanto Di Media .....	89
10. Penggunaan Media .....	90
11. Uji Reliabilitas Variabel X .....	91
12. Uji Reliabilitas Variabel Y .....	91
13. Karakteristik Responden Berdasarkan Jurusan .....	92
14. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	93
15. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .....	93
16. Pengetahuan Responden Mengenai Pemberitaan Kasus Dugaan Korupsi E-KTP Setya Novanto Di Media .....	94
17. Penggunaan Media .....	95
18. Untuk mengetahui pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto, berapa lama anda menonton media televisi dalam sehari .....	97
19. Untuk mengetahui pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto, berapa lama anda menonton media radio dalam sehari .....	97
20. Untuk mengetahui pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto, berapa lama anda menonton media internet dalam sehari .....	98
21. Untuk mengetahui pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto, berapa lama anda menonton media koran dalam sehari .....	99
22. Persentase jawaban pada dimensi durasi dalam mengakses pemberitaan berdasarkan media yang digunakan .....	99
23. Penilaian Pernyataan Pada Dimensi Durasi .....	101
24. Untuk mengetahui pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto, berapa kali anda menonton media televisi dalam seminggu .....	102

25. Untuk mengetahui pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto, berapa kali anda mendengarkan media radio dalam seminggu .....	103
26. Untuk mengetahui pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto, berapa kali anda mengakses media internet dalam seminggu .....	104
27. Untuk mengetahui pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto, berapa kali anda membaca media koran dalam seminggu .....	104
28. Media televisi yang ditonton terkait informasi pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto mudah ditemukan secara lengkap .....	105
29. Media radio yang didengar terkait informasi pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto mudah ditemukan secara lengkap .....	106
30. Media internet yang diakses terkait informasi pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto mudah ditemukan secara lengkap .....	106
31. Media koran yang dibaca terkait informasi pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto mudah ditemukan secara lengkap .....	107
32. Media televisi yang ditonton terkait informasi pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto cepat diakses / dibuka secara lengkap .....	108
33. Media radio yang didengar terkait informasi pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto cepat diakses / dibuka secara lengkap .....	108
34. Media internet yang diakses terkait informasi pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto cepat diakses / dibuka secara lengkap .....	109
35. Media koran yang dibaca terkait informasi pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto cepat diakses / dibuka secara lengkap .....	110
36. Persentase jawaban pada dimensi frekuensi dalam mengakses pemberitaan berdasarkan media yang digunakan .....	110
37. Penilaian Pernyataan Pada Dimensi frekuensi .....	111
38. Informasi yang disajikan oleh media televisi terkait pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto sesuai dengan fakta .....	112
39. Informasi yang disajikan oleh media radio terkait pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto sesuai dengan fakta .....	113
40. Informasi yang disajikan oleh media internet terkait pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto sesuai dengan fakta .....	114
41. Informasi yang disajikan oleh media koran terkait pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto sesuai dengan fakta .....	114
42. Informasi terkait pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto disajikan secara rinci oleh media televisi .....	115
43. Informasi terkait pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto disajikan secara rinci oleh media radio .....	116
44. Informasi terkait pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto disajikan secara rinci oleh media internet .....	116
45. Informasi terkait pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto disajikan secara rinci oleh media koran .....	117
46. Media televisi, tidak menyebarkan informasi <i>hoax</i> (berita palsu) terkait pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto .....	118
47. Media radio tidak menyebarkan informasi <i>hoax</i> (berita palsu) terkait pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto .....	118
48. Media internet, tidak menyebarkan informasi <i>hoax</i> (berita palsu) terkait pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto .....	119
49. Media koran, tidak menyebarkan informasi <i>hoax</i> (berita palsu) terkait pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto .....	120

50. Berita mengenai pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto selalu menghadirkan narasumber terpercaya yang ahli dibidangnya .....	120
51. Narasumber yang diwawancarai oleh media televisi, terkait pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto mempunyai jabatan sesuai dengan topik berita .....	121
52. Narasumber yang diwawancarai oleh media radio, terkait pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto mempunyai jabatan sesuai dengan topik berita .....	122
53. Narasumber yang diwawancarai oleh media internet, terkait pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto mempunyai jabatan sesuai dengan topik berita .....	122
54. Narasumber yang diwawancarai oleh media koran, terkait pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto mempunyai jabatan sesuai dengan topik berita .....	123
55. Adanya kesesuaian antara judul, <i>lead</i> , gambar dan <i>body text</i> dalam informasi yang disajikan oleh media televisi, terkait dengan pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto .....	124
56. Adanya kesesuaian antara judul, <i>lead</i> , gambar dan <i>body text</i> dalam informasi yang disajikan oleh media radio, terkait dengan pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto .....	125
57. Adanya kesesuaian antara judul, <i>lead</i> , gambar dan <i>body text</i> dalam informasi yang disajikan oleh media internet, terkait dengan pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto .....	125
58. Adanya kesesuaian antara judul, <i>lead</i> , gambar dan <i>body text</i> dalam informasi yang disajikan oleh media koran, terkait dengan pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto .....	126
59. Adanya kelengkapan unsur berita 5W+1H dalam pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto informasi yang disajikan oleh media televisi .....	127
60. Adanya kelengkapan unsur berita 5W+1H dalam pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto informasi yang disajikan oleh media radio .....	127
61. Adanya kelengkapan unsur berita 5W+1H dalam pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto informasi yang disajikan oleh media internet .....	128
62. Adanya kelengkapan unsur berita 5W+1H dalam pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto informasi yang disajikan oleh media koran .....	129
63. Informasi terkait pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto yang disajikan oleh media televisi, <i>update</i> setiap hari (menampilkan data terbaru perkembangan kasus) .....	130
64. Informasi terkait pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto yang disajikan oleh media radio, <i>update</i> setiap hari (menampilkan data terbaru perkembangan kasus) .....	130
65. Informasi terkait pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto yang disajikan oleh media internet, <i>update</i> setiap hari (menampilkan data terbaru perkembangan kasus) .....	131

66. Informasi terkait pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto yang disajikan oleh media koran, <i>update</i> setiap hari (menampilkan data terbaru perkembangan kasus) .....	132
67. Informasi terkait pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto yang disajikan oleh media televisi, aktual (terbaru atau terkini) ....	133
68. Informasi terkait pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto yang disajikan oleh media radio, aktual (terbaru atau terkini) .....	133
69. Informasi terkait pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto yang disajikan oleh media internet, aktual (terbaru atau terkini) ...	134
70. Informasi terkait pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto yang disajikan oleh media koran, aktual (terbaru atau terkini) .....	135
71. Persentase jawaban Pada Dimensi Kredibilitas Sumber .....	135
72. Penilaian Pernyataan Pada Dimensi Kredibilitas Sumber .....	138
73. DPR RI dibawah kepemimpinan Setya Novanto adalah institusi negara yang patuh dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih.....	140
74. DPR RI dibawah kepemimpinan Setya Novanto adalah institusi negara, patuh dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan .....	140
75. DPR RI dibawah kepemimpinan Setya Novanto adalah institusi negara, patuh dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel (bertanggung jawab) .....	141
76. Saya percaya DPR RI dibawah kepemimpinan Setya Novanto adalah institusi negara yang menerapkan tata kelola pemerintahan bebas dari praktik KKN .....	142
77. Saya percaya DPR RI dibawah kepemimpinan Setya Novanto adalah institusi negara yang konsisten dalam menjalankan tugas dengan menerapkan tata kelola pemerintahan bebas dari praktik KKN .....	143
78. Menurut saya, DPR RI dibawah kepemimpinan Setya Novanto menjalankan program kerja dengan baik sesuai kode etik lembaga yaitu bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).....	144
79. Persentase Jawaban Pada Dimensi Integritas .....	144
80. Penilaian Pernyataan Pada Dimensi Integritas.....	146
81. Saya percaya, DPR RI dibawah kepemimpinan Setya Novanto menjalankan tugasnya dengan cepat dalam mengambil keputusan untuk rakyat terhadap suatu kebijakan .....	147
82. Menurut saya, DPR RI dibawah kepemimpinan Setya Novanto menjalani tugasnya semaksimal mungkin sesuai dengan aspirasi rakyat dan mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan .....	147
83. Menurut saya, DPR RI dibawah kepemimpinan Setya Novanto melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU (sesuai aturan) .....	148
84. Saya percaya, DPR RI dibawah kepemimpinan Setya Novanto membahas rancangan UU yang diusulkan oleh presiden ataupun DPD dengan baik (sesuai aturan) .....	149
85. Saya percaya, DPR RI dibawah kepemimpinan Setya Novanto menetapkan UU bersama dengan presiden dengan baik (sesuai aturan) .....	150
86. Saya percaya, DPR RI dibawah kepemimpinan Setya Novanto menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan presiden) untuk ditetapkan menjadi UU (sesuai aturan) .....	150

87. Menurut saya, DPR RI dibawah kepemimpinan Setya Novanto melakukan pembahasan terhadap pelaksanaan APBN (sesuai aturan) .....	151
88. Menurut saya, DPR RI dibawah kepemimpinan Setya Novanto melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN (sesuai aturan) .....	152
89. Saya percaya, DPR RI dibawah kepemimpinan Setya Novanto bertanggungjawab terhadap pelaksanaan APBN (sesuai aturan) .....	153
90. Saya percaya, Pembuatan kebijakan telah sesuai dengan tujuan lembaga ...	153
91. Saya percaya, DPR RI dibawah kepemimpinan Setya Novanto mengambil keputusan berdasarkan mufakat yang dilakukan kepada anggota rapat untuk mengemukakan pendapat dengan baik (sesuai aturan) .....	154
92. Persentase Jawaban Pada Dimensi Kompetensi .....	155
93. Penilaian Pernyataan Pada Dimensi Kompetensi .....	157
94. Saya percaya, DPR RI dibawah kepemimpinan Setya Novanto melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya dengan jujur dan disiplin .....	158
95. Saya percaya, DPR RI dibawah kepemimpinan Setya Novanto menjaga citra baik lembaga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya (sesuai aturan) .....	159
96. Menurut saya, DPR RI dibawah kepemimpinan Setya Novanto adalah lembaga negara yang independen dan netral .....	159
97. Saya percaya, setiap anggota DPR RI menaati tata tertib dan kode etik lembaga dengan baik (sesuai aturan) .....	160
98. Saya percaya, setiap anggota DPR RI menjalankan kode etik untuk menjaga kehormatan lembaga dengan baik (sesuai aturan).....	161
99. Menurut saya, anggota DPR RI dapat menjalankan amanat negara dengan penuh tanggung jawab dengan baik (sesuai aturan) .....	161
100. Menurut saya, anggota DPR RI menjalankan amanat negara untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat (sesuai aturan) .....	162
101. Persentase Jawaban Pada Dimensi Loyalitas (Kesetiaan) .....	163
102. Penilaian Pernyataan Pada Dimensi Loyalitas (Kesetiaan) .....	164
103. Menurut saya, pencarian informasi pada <i>website</i> DPR RI mudah ditemukan .....	165
104. Saya percaya, <i>link</i> yang ada di <i>website</i> DPR RI berfungsi dengan baik (tidak <i>error</i> ) .....	166
105. Saya percaya, informasi terkait dengan agenda kegiatan mudah diakses melalui <i>website</i> DPR RI.....	166
106. Saya percaya, informasi terkait dengan agenda kegiatan, disajikan secara aktual (terbaru atau terkini).....	167
107. Saya percaya, informasi terkait dengan program kerja disajikan melalui <i>website</i> DPR RI menggunakan bahasa yang mudah dipahami .....	167
108. Saya percaya, informasi terkait dengan program kerja yang disajikan pada <i>website</i> DPR RI lengkap .....	168
109. Saya percaya, informasi terkait dengan program kerja, disajikan secara aktual (terbaru atau terkini) melalui <i>website</i> DPR RI .....	169
110. Saya percaya, pencarian informasi terkait dengan program kerja pada <i>website</i> DPR RI mudah ditemukan .....	169
111. Saya percaya, informasi terkait dengan laporan tahunan dipublikasikan melalui <i>website</i> DPR RI dapat dipercaya.....	170



112. Menurut saya, informasi terkait dengan laporan tahunan dipublikasikan melalui <i>website</i> DPR RI secara lengkap .....	171
113. Persentase Jawaban pada Dimensi Keterbukaan / Transparansi .....	171
114. Penilaian Pernyataan pada Dimensi Keterbukaan / Transparansi .....	173
115. Rekapitulasi Total Pertanyaan dan Presentase Jawaban .....	174
116. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana .....	185
117. Hasil Uji Hipotesis Uji F .....	189
118. Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	191
119. Interpretasi Data .....	192
120. Interpretasi Data .....	192

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Proses Pembentukan Opini Publik.....	29
2. Opini Publik yang Diawali Stimuli.....	30
3. Bagan Kerangka Pikir .....	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Media komunikasi massa merupakan sarana penyampaian pesan-pesan, aspirasi masyarakat, sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ataupun pesan kepada masyarakat langsung secara luas. Media massa menurut Lasswell (Setiati, 2005:67), berperan dalam menyebarkan informasi secara obyektif dan melakukan kontrol sosial bagi pembaca. Media massa sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya media elektronik, media cetak dan media siber.

Media massa merupakan wadah bagi masyarakat untuk menggali informasi di segala bidang kehidupan. Media massa mampu mempengaruhi pemikiran dan tindakan khalayak. Media massa dikatakan sebagai kebudayaan bercerita. Pesan media tidak terjadi begitu saja, tetapi dibuat dan diciptakan oleh media massa dengan tujuan tertentu (Ardianto, 2007:58). Fenomena ini ditandai dengan ketika pers berani mengungkapkan kasus-kasus korupsi maupun skandal-skandal yang diduga melibatkan beberapa pejabat publik, menteri, anggota dewan sampai ketua partai, baik dilakukan dari tingkat paling atas sampai ke tingkat paling bawah.

Terlibatnya Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, diduga mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 2,3 triliun dari total nilai proyek sebesar Rp 5,9 triliun. Setya diduga bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya terhadap jabatannya. (<http://news.metrotvnews.com> diakses pada 22 November 2017).

Tugas DPR adalah mengawal pembangunan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Berperan sebagai institusi yang menjalankan fungsi legislasi terutama dalam pembuatan kebijakan publik dan pengawasan akan eksekutif serta bertugas untuk menyerap, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi rakyat (<http://www.dpr.go.id/> diakses pada 22 November 2017).

Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menyatakan bahwa sebagai pejabat negara, sudah seharusnya menjaga integritasnya untuk menunjukkan komitmen akan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel guna menekan tingkat penyimpangan termasuk perbuatan-perbuatan koruptif. Jika seorang pejabat negara terbukti melakukan tindakan KKN maka perilaku tersebut dapat mencoreng integritas sebuah lembaga serta tidak mencerminkan keteladanan yang baik sebagai seorang pemimpin. Hal ini, dapat berdampak pada melunturnya kepercayaan publik dan menjadi penghambat tercapainya kesejahteraan di masyarakat.

Media massa diyakini memiliki kemampuan dalam mempengaruhi pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Bahkan media massa dengan mudah dapat mengarahkan masyarakat membentuk opini akan suatu peristiwa yang selanjutnya akan terjadi. Media massa mampu mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi kehidupan di masa kini dan dimasa mendatang (Nurudin. 2009:255).

Salah satu fungsi media massa ialah menjadi wacana pembentukan opini publik. Melalui berita, komentar, editorial dan artikel yang dimuat dalam surat kabar, serta wawancara yang dilakukan dalam media televisi dan radio dapat menimbulkan berbagai macam tafsiran dan pendapat yang berbeda-beda dari kalangan pembaca dan pemirsa. Media massa dengan kemampuannya dalam membuat agenda, dapat memancing perhatian khalayaknya untuk menyatakan apakah ia setuju atau tidak terhadap gagasan yang disampaikan oleh media massa. Oleh sebab itu, media massa tidak hanya bisa dilihat dari aspek sebagai industri hiburan, dan informasi, tetapi juga sebagai sarana pembentuk opini publik. Kemampuan media massa membentuk opini publik, maka aktivitas para pemimpin negara, politisi dan pengambil kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari peran media (Cangara, 2016:155).

Pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP yang diduga dilakukan Setya Novanto selama kurun waktu empat bulan, terhitung dari bulan Juli s.d bulan November 2017 menjadi isu yang hangat diperbincangkan di banyak media massa mulai dari media elektronik, media cetak maupun media internet. Alasan tersebutlah, peneliti pilih menjadi batasan waktu dalam penelitian ini. Berikut ini adalah data-data pemberitaan periode bulan Juli s.d bulan November 2017 :

**Tabel 1. Pemberitaan Kasus Dugaan Korupsi E-KTP di Media Periode Bulan Juli s.d Bulan November 2017 pada Portal Berita Kompas.com & Jawapos.com**

Periode	Pemberitaan
Bulan Juli	<p><b>17 Juli 2017 :</b> KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor: Sprin.Dik56/01/07/2017.</p> <p><b>18 Juli 2017 :</b> Setya Novanto menggelar jumpa pers menanggapi penetapannya sebagai tersangka. Novanto mengaku akan mengikuti proses hukum yang berjalan.</p>
Bulan September	<p><b>4 September 2017 :</b> Novanto resmi mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan terdaftar dalam nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel. Novanto meminta penetapan statusnya sebagai tersangka dibatalkan KPK.</p> <p><b>18 September 2017 :</b> KPK kembali memanggil SN untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun Novanto tidak hadir karena sakit. Novanto harus menjalani kateterisasi jantung di RS. Premier Jatinegara, Jakarta Timur.</p> <p><b>29 September 2017 :</b> Hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan sebagian permohonan SN. Penetapan SN sebagai tersangka oleh KPK dianggap tidak sah alias batal. Hakim juga meminta KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap SN.</p>
Bulan Oktober	<p><b>5 Oktober 2017 :</b> KPK lakukan penyelidikan baru untuk pengembangan perkara e-KTP. Dalam hal ini, KPK telah meminta keterangan sejumlah pihak dan mengumpulkan bukti relevan.</p> <p><b>13 dan 18 Oktober 2017 :</b> Setya Novanto tidak hadir untuk dimintai keterangan dengan alasan tugas kedinasan.</p> <p><b>31 Oktober 2017 :</b> Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDB) yang dikeluarkan oleh KPK untuk SN, tertulis Sprindik dengan nomor Sprin.Dik-113/01/10/2017.</p>
Bulan November	<p><b>3 November 2017 :</b> KPK telah mengantarkan surat perintah dimulainya penyidikan ke rumah SN di Jalan Wijaya 13, Melawai, Kebayoran Baru.</p> <p><b>16 November 2017 :</b> Ketua DPR RI SN dikabarkan mengalami kecelakaan mobil, Ia kemudian dilarikan ke RS. Medika Permata Hijau, Jakarta Selatan.</p> <p><b>20 November 2017 :</b> Ketua DPR SN telah resmi menjadi penghuni Rutan KPK. Tersangka dugaan korupsi pengadaan e-KTP ini ditahan setelah menjalani pemeriksaan kurang dari dua jam selepas dibawa dari RS. Cipto Mangunkusumo (RSCM).</p>

Sumber : <http://nasional.kompas.com>,  
<https://www.jawapos.com> (diakses pada 22 November 2017)

Kepercayaan publik merupakan hasil penggabungan dari pengetahuan kognitif publik tentang karakteristik jati diri institusi pemerintah dan para pejabatnya, hubungan emosional publik dengan berbagai institusi pemerintah dan pejabatnya serta penilaian mereka tentang perilaku institusi penyelenggara layanan publik dan kegiatan pemerintahan, interaksi dari ketiganya menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan pejabatnya (Dwiyanto, 2011:16).

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah pada umumnya terkait dengan isu-isu publik tertentu. Ketika institusi pemerintah dan para pejabatnya mengambil pilihan yang benar dan sesuai dengan harapan dan aspirasi rakyat, maka publik cenderung menaruh kepercayaan kepada pemerintah. Sebaliknya, ketika respon pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik tertentu dinilai oleh publik sebagai pilihan kebijakan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan harapan, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan merosot. Kepercayaan publik secara rasional terbentuk ketika publik dan para pemangku kepentingan menilai tindakan yang diambil oleh institusi pemerintah dan para pejabatnya sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat (Dwiyanto, 2011: 355-357).

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap DPR cenderung rendah. Kepercayaan terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh adanya informasi tentang berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut dapat membentuk persepsi dalam pikiran masyarakat (Dwiyanto, 2011:357). Beberapa media massa saat ini memberitakan bahwa kepercayaan publik terhadap DPR paling buruk di bawah kepemimpinan Setya Novanto. Berikut adalah data hasil lembaga

survei terhadap kepercayaan publik pada DPR-RI di bawah kepemimpinan Setya Novanto :

**Tabel 2. Data Hasil Lembaga Survei LSI, (LPC&ICW), dan CSIS Terhadap Kepercayaan Publik Pada DPR-RI yang diadopsi dari berbagai sumber**

No.	Lembaga Survei	Waktu & Tempat Survei	Hasil Survei
1.	Lembaga Survei Indonesia (LSI)	11-15 Desember 2015, 1200 orang responden di 34 provinsi di Indonesia	Publik menilai para wakil rakyat yang bekerja untuk rakyat hanya sebesar 40%. Sementara, publik yang percaya kalau para wakil rakyat yang bekerja untuk kepentingan sendiri atau kelompok sebesar 51.80 %.
2.	Lembaga Polling Center (LPC) & Lembaga Swadaya Masyarakat Antikorupsi Indonesia <i>Corruption Watch</i> (ICW)	April & Mei 2017, 2.235 orang responden di 34 provinsi di Indonesia	Tingkat kepercayaan publik terhadap DPR cenderung rendah, karena masyarakat merasa tidak berinteraksi secara langsung dengan DPR. Selain itu citra DPR dinilai sudah negatif di mata masyarakat. Terdapat tiga lembaga paling tidak dipercaya masyarakat. Lembaga ini hanya mendapat skor 35% (Parpol), 49% (perusahaan swasta) & 51% (DPR). Para responden menilai tingkat kepercayaan atas lembaga ini rendah karena banyak pelaku korupsi berasal dari ketiganya.
3.	<i>Centre for Strategic and International Studies</i> (CSIS)	September 2017, 1.000 responden di 34 provinsi di Indonesia	Polemik Pansus Hak Angket KPK dan dinamika pengusutan kasus e-KTP, memengaruhi kepercayaan publik terhadap DPR. Pandangan publik menilai kinerja DPR terbilang sangat baik dalam hal pembuatan UU hanya sebesar 4,6%. Terkait pembahasan & mengesahkan APBN hanya sebesar 2,9%. Sedangkan terkait pengawasan & pelaksanaan UU hanya 4,1%. Adapun, yang menilai cukup baik hanya 47,7% dalam hal pengawasan & pelaksanaan UU. Terkait pembahasan & mengesahkan APBN sebesar 49,1%, pembuatan UU sebesar 50,7%.

Sumber : <http://nasional.harianterbit.com>

<https://nasional.tempo.co>

<http://nasional.kompas.com> (diakses pada 22 November 2017).



Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto di media berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik pada DPR-RI. Sedangkan, alasan penulis memilih mahasiswa sebagai subyek pada penelitian ini adalah karena mahasiswa memiliki peran yang sangat besar dalam berjalannya suatu roda pemerintahan. Selain terus mengembangkan diri pada bidang ilmunya masing-masing, mahasiswa juga menjadi salah satu tumpuan masyarakat sebagai pengawas kinerja suatu institusi. Mahasiswa dianggap sebagai kaum intelektual yang dapat mengimplementasikan kepeduliannya langsung kepada masyarakat. Mahasiswa dipercaya sebagai kaum yang kaya akan gagasan. Mahasiswa diharapkan berperan menilai kelebihan dan kekurangan dari suatu kebijakan ataupun peraturan yang ada.

Pada penelitian ini, peneliti memilih FISIP Universitas Lampung sebagai subyek penelitian, dikarenakan peneliti sedang melakukan studi di Universitas Lampung. Sehingga keterjangkauan tempat, mempermudah peneliti dalam mendapatkan data responden. Selain itu, alasan lain adalah FISIP merupakan disiplin ilmu yang di dalamnya memiliki program studi ilmu politik, mempelajari bagaimana sebuah pemerintahan berjalan, dampak kebijakan pemerintah terhadap stabilitas ekonomi dan pertumbuhan negara, dan bagaimana sebuah kebijakan yang diambil pemerintah dapat mempengaruhi perubahan sosial dan politik. Keterkaitan antara ilmu yang dipelajari dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini, yaitu menyangkut pada tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara menjadikan alasan peneliti memilih FISIP Universitas Lampung sebagai subyek penelitian. Subyek yang dipilih

merupakan mahasiswa angkatan 2016, karena pada angkatan tersebut mahasiswa masih aktif dalam masa studi perkuliahan dan pada angkatan tersebut pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP ini sudah ramai diperbincangkan, sehingga memungkinkan mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pemberitaan tersebut.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto di Media berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik pada DPR-RI (Studi Pada Mahasiswa FISIP Universitas Lampung Angkatan 2016) ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto periode bulan Juli s.d bulan November 2017 di media terhadap tingkat kepercayaan publik pada DPR-RI (Studi Pada Mahasiswa FISIP Universitas Lampung Angkatan 2016).

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

### **1.4.1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan studi Ilmu Komunikasi di bidang jurnalistik, khususnya komunikasi media massa yang berkaitan dengan etika pemberitaan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa dalam memacu dan meningkatkan wawasan ilmiah tentang pengaruh pemberitaan terhadap suatu lembaga.

### **1.4.2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan agar masyarakat lebih selektif dan kritis dalam menerima berita di media.

#### **b. Bagi Media**

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemilik media dalam mengelola kegiatan jurnalistiknya agar lebih baik dalam hal etika pemberitaan dan menerapkan kaidah jurnalistik khususnya prinsip keberimbangan.

#### **c. Bagi DPR-RI**

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para wakil rakyat atau orang-orang yang duduk di lembaga negara, untuk menjaga integritasnya dan mencerminkan perilaku yang baik sebagai seorang pemimpin rakyat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian ini. Rujukan pertama, merupakan skripsi yang ditulis oleh Nada Rohmah, lulusan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul Pengaruh Pemberitaan Penangkapan Bambang Widjojanto di Metro TV Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Citra KPK. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh pemberitaan di media terhadap opini publik pada sebuah lembaga. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini meneliti tentang apakah ada pengaruh pemberitaan penangkapan Bambang Widjojanto di Metro TV terhadap persepsi mahasiswa aktivis tentang citra KPK. Sedangkan penelitian ini meneliti bagaimana pengaruh pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto di media terhadap tingkat kepercayaan publik pada DPR-RI.

Rujukan kedua, ialah sebuah skripsi yang ditulis oleh Luknia Sari Putri, lulusan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul Pengaruh Terpaan Media Televisi Dalam Pembentukan Citra Kepolisian. Persamaan pada penelitian ialah

bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberitaan di media terhadap opini publik pada sebuah lembaga. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini meneliti pengaruh terpaan media televisi dalam pembentukan citra Kepolisian. Pada penelitian ini akan meneliti bagaimana pengaruh pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto di media terhadap tingkat kepercayaan publik pada DPR-RI.

Rujukan ketiga, ialah jurnal penelitian sebuah skripsi yang ditulis oleh Listianto Hindra Pramono, lulusan Universitas Diponegoro, berjudul Hubungan Terpaan Pemberitaan Korupsi di Televisi dan Pernyataan Presiden SBY di Televisi dengan Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah. Persamaan pada penelitian ialah sama-sama meneliti tentang pengaruh pemberitaan di media terhadap opini publik pada sebuah lembaga. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini meneliti hubungan terpaan pemberitaan korupsi di televisi dan pernyataan presiden SBY di televisi dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Sedangkan, penelitian kali meneliti pengaruh pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto di media terhadap tingkat kepercayaan publik pada DPR-RI.

Pemaparan di atas telah dijelaskan mengenai perbedaan dan persamaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemberitaan Kasus Dugaan Korupsi e-KTP Setya Novanto di Media Terhadap Tingkat Kepercayaan Publik Pada DPR-RI (Studi Pada Mahasiswa FISIP Universitas Lampung Angkatan 2016)” dapat dilakukan karena masalah yang akan diteliti bukan duplikasi dari penelitian-penelitian yang sebelumnya.

**Tabel 3. Penelitian Terdahulu, diadopsi dari berbagai sumber yaitu :**

<b>No.</b> 1.	<b>Judul Penelitian</b>	Pengaruh Pemberitaan Penangkapan Bambang Widjojanto di Metro TV Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Citra KPK (survei pada mahasiswa aktivis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
	<b>Penulis</b>	Nada Rohmah. Konsentrasi Jurnalistik, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1436 H./2015 M.
	<b>Hasil</b>	Terdapat pengaruh persepsi mahasiswa pada citra KPK terhadap pemberitaan penangkapan Bambang Widjojanto di Metro TV.
	<b>Persamaan Pada Penelitian ini</b>	Persamaannya adalah sama-sama meneliti pengaruh pemberitaan di media terhadap opini publik pada sebuah lembaga. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif.
	<b>Perbedaan Pada Penelitian ini</b>	Perbedaannya adalah yaitu penelitian tersebut meneliti apakah ada pengaruh pemberitaan tersebut terhadap persepsi mahasiswa aktivis tentang citra KPK setelah munculnya pemberitaan. Sedangkan penelitian ini meneliti Pengaruh Pemberitaan Kasus Dugaan Korupsi e-KTP Setya Novanto di Media Terhadap Tingkat Kepercayaan Publik Pada DPR-RI.
	<b>Kontribusi Pada Penelitian ini</b>	Membantu penulis mendapatkan informasi terkait dengan tingkat kepercayaan publik, dan pengaruh pemberitaan di media terhadap tingkat kepercayaan publik pada lembaga negara.
<b>No.</b> 2.	<b>Judul Penelitian</b>	Pengaruh Terpaan Media Televisi Dalam Pembentukan Citra Kepolisian (Survei pada Penonton Acara Televisi 86 Net TV Di Dusun Pungkursari Sidorejo Salatiga)
	<b>Penulis</b>	Luknia Sari Putri. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
	<b>Hasil</b>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap terpaan media televisi 86 NET TV pada citra polisi di masyarakat Pungkursari Salatiga.
	<b>Persamaan Pada Penelitian ini</b>	Persamaannya adalah mengetahui pengaruh pemberitaan di media terhadap opini publik pada sebuah lembaga.
	<b>Perbedaan Pada Penelitian ini</b>	Perbedaannya adalah penelitian tersebut meneliti pengaruh terpaan media televisi dalam pembentukan citra kepolisian. Sedangkan penelitian ini meneliti pengaruh pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto di media terhadap tingkat kepercayaan publik pada DPR-RI.
	<b>Kontribusi Pada Penelitian ini</b>	Membantu penulis mendapatkan informasi berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik, dan bagaimana pengaruh pemberitaan di media terhadap tingkat kepercayaan publik pada lembaga
<b>No.</b> 3.	<b>Judul Penelitian</b>	Hubungan Terpaan Pemberitaan Korupsi di Televisi dan Pernyataan Presiden SBY di Televisi dengan Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah.
	<b>Penulis</b>	Listianto Hindra Pramono. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro 2013.

<b>Hasil</b>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara terpaan pemberitaan korupsi di televisi dan pernyataan presiden SBY di televisi dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Artinya bahwa ketika terpaan pemberitaan korupsi di televisi tinggi dan terpaan pernyataan presiden SBY di televisi (dalam hal ini pernyataan Presiden SBY dalam pidatonya tentang konflik KPK-POLRI) tinggi maka tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah cenderung rendah.
<b>Persamaan Pada Penelitian ini</b>	Persamaannya adalah meneliti tentang pengaruh pemberitaan di media terhadap opini publik pada sebuah lembaga.
<b>Perbedaan Pada Penelitian ini</b>	Perbedaannya adalah penelitian tersebut meneliti hubungan terpaan pemberitaan korupsi di televisi dan pernyataan presiden SBY di televisi dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Sedangkan penelitian ini meneliti pengaruh pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto di media terhadap tingkat kepercayaan publik pada DPR-RI.
<b>Kontribusi Penelitian tersebut pada Penelitian ini</b>	Membantu penulis mendapatkan informasi berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik, dan bagaimana pengaruh pemberitaan di media terhadap tingkat kepercayaan publik pada lembaga negara.

Sumber : <http://repository.uinjkt.ac.id>  
<http://digilib.uin-suka.ac.id>  
<https://ejournal3.undip.ac.id> (Diakses pada 2 Desember 2017)

## 2.2 Pemberitaan Media Massa

Pemberitaan berasal dari kata berita yang ditambahkan imbuhan pem-an. Dimana berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online yang berarti proses, cara, perbuatan, memberitakan, perkabaran, dan maklumat (<http://kbbi.web.id/pemberitaan> diakses pada 2 Desember 2017). Jadi, pemberitaan adalah proses laporan atau pemberitahuan kepada khalayak mengenai terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan yang bersifat umum, baru saja terjadi disampaikan oleh wartawan dan disiarkan melalui media massa secara berkelanjutan (Husnun Djuraid, 2006: 11).

Pemberitaan adalah proses penyampaian informasi yang penting atau menarik bagi khalayak. Suatu informasi dapat dikatakan penting jika informasi itu

memberikan pengaruh atau memiliki dampak kepada penonton atau pembacanya. Informasi yang memberikan dampak kepada penonton atau pembacanya adalah informasi yang bernilai berita (Morrisan, 2008:8).

Pemberitaan merupakan laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi khalayak serta menyangkut kepentingan publik (Michael V. Charnley dalam Apriadi Tamburaka, 2003:35). Dalam hal ini, dijelaskan bahwa pemberitaan merupakan pelaporan sesuatu hal yang sedang marak terjadi di masyarakat umum dan dalam perkembangannya menjadi *trending topic* di masyarakat umum.

Menurut William S. Maulsby dalam Purnama Kusumaningrat, (2010:1) pemberitaan adalah proses penyampaian pesan kepada khalayak secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik, tidak memihak, berdasarkan fakta dan mempunyai arti penting serta baru saja terjadi.

Jadi, pemberitaan adalah proses penyampaian pesan atau informasi berdasarkan fakta dan baru saja terjadi disiarkan melalui media massa secara berkelanjutan, dikemas sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik, mampu menarik perhatian, sehingga menimbulkan rasa penasaran khalayak serta dapat mempengaruhi persepsi dan pendapat publik terhadap cara pemberitaan sebuah berita.



### 2.3 Aspek Penilaian Pemberitaan di Media Massa

Melalui Pemberitaan media ini aspek penilaian yang digunakan adalah berusaha mencari data khalayak dari aspek akses publik terhadap pemberitaan melalui media baik jenis media, durasi penggunaan maupun frekuensi penggunaan. Selain frekuensi dan durasi, hubungan antara khalayak dengan isi media itu juga berkaitan dengan perhatian (*attention*) yaitu proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada stimuli yang lainnya melemah. Dari teori mengenai pemberitaan media ini, maka peneliti mengukur pemberitaan media berdasarkan pada komponen durasi, frekuensi.

Untuk mengukur variabel penilaian terhadap peran media massa digunakan tiga aspek sebagai berikut:

1. Apakah media massa telah memadai di dalam menggunakan ruang dan waktu untuk memberikan informasi atau berita-berita yang beragam perspektif.
2. Apakah media massa telah memadai dalam memberikan tempat atau forum untuk adanya debat publik bagi gagasan-gagasan, pendapat, dan aspirasi-aspirasi yang saling berbeda.
3. Apakah media massa telah mendorong khalayak untuk belajar lebih banyak tentang topik tertentu (Pawito, 2008: 262).

Variabel pemberitaan media diukur dengan seberapa banyak waktu (berapa jam) dalam setiap harinya dihabiskan untuk menonton televisi, mendengarkan radio, membaca surat kabar, serta mengakses internet. Pada penelitian ini untuk masing-masing aspek pemberitaan media ini dibuatkan kategori, tingkat pemberitaan tergolong tinggi dan rendah (Pawito, 2008:263).

- a. Durasi penggunaan media, pengukuran durasi media yaitu dengan menghitung berapa lama khalayak mengakses media (berapa jam sehari) atau berapa lama (menit) khalayak mengakses media.
- b. Frekuensi penggunaan media, frekuensi penggunaan media berkaitan dengan tingkat keseringan khalayak dalam menonton, membaca dan mengakses berita perminggu.

Penilaian lain yang mencakup pada aspek pemberitaan adalah kredibilitas sumber. Literatur yang ada mengenai sumber informasi telah menunjukkan bahwa kredibilitas sumber menentukan efektivitas suatu komunikasi. Kredibilitas sumber didefinisikan sebagai hal pengidentifikasian suatu sumber informasi agar dianggap sebagai kredibel oleh pembaca.

### **2.3.1 Kredibilitas Sumber**

Media berita tidak bisa lepas dari aspek kredibilitas yang harus selalu dipertahankan. Kredibilitas media atau sumber sangat penting bagi audiens. Ada dua macam kredibilitas, yaitu kredibilitas terhadap sumber dan kredibilitas terhadap media. Kredibilitas terhadap sumber berkaitan dengan kepercayaan individu yang menulis berita tersebut, sedangkan kredibilitas media berkaitan dengan kesatuan yang lebih luas, seperti stasiun televisi, koran, dan tentunya media online (dalam jurnal Kovacic, dkk, 2010: 116). Jadi kredibilitas dilihat dari individu dan media itu sendiri.

Kredibilitas media dapat dilihat dari hasil evaluasi sumber informasi, pesan itu sendiri, atau pada kombinasi antara sumber dengan pesan. Maka yang dimaksud

kredibel atau tidaknya media dapat ditentukan dari sumber dan isi pesan yang disampaikan. Jika sumbernya sesuai dan pesan yang disampaikan benar maka dapat dikatakan informasi tersebut kredibel (dalam jurnal Metzger dan Flanagin, 2013:211).

Salah satu cara untuk melihat profesionalitas media adalah dengan mengukur objektivitas media yang mencerminkan aktualisasi nilai dan presentasi media. Mengacu pada riset Dewan Pers tahun 2004, bertajuk “Monitoring dan Evaluasi Pemberitaan di media”. Dewan Pers menyusun enam dimensi unit analisis yang meliputi:

**1. *Factualness* (faktual)**

*Factualness* sebagai derajat kefaktualan berita, penyajian sebuah berita berdasarkan prinsip-prinsip jurnalistik yakni dengan menggunakan susunan piramida terbalik. Adapun mengenai cara pemberitaan, wartawan tidak menyajikan pendapatnya sebagai berita atau fakta. Apabila suatu berita ditulis atau disiarkan dengan opini, maka berita tersebut wajib disajikan dengan menyebutkan nama penulisnya. (Kusumaningrat, 2006:307).

**2. *Accuracy* (ketepatan)**

Akurasi adalah standar profesional dan operasional yang harus diterapkan oleh wartawan. Penulisan berita yang tidak akurat akan mengakibatkan hilangnya kredibilitas sumber (Ishwara Luwi, 2005:21). Dalam penelitian Dewan Pers tahun 2004, “Akurasi diukur dengan menggunakan beberapa dimensi, antara lain verifikasi terhadap fakta, relevansi sumber berita, dan akurasi penyajian” (Rahayu.ed.,2006:15).

Verifikasi terhadap fakta menyangkut sejauh mana berita yang ditampilkan berkorespondensi dengan kebenaran yang terjadi di lapangan. Verifikasi terhadap fakta diukur berdasarkan dua elemen yaitu, terdapat cek-riccek terhadap berita yang disajikan oleh wartawan dan terdapat kesalahan pengutipan data, narasumber, tanggal, nama institusi atau alamat (Rahayu.ed.,2006:16). Relevansi sumber berita menyangkut kompetensi sumber berita sebagai sumber fakta. Akurasi juga sangat penting bagi subjek berita, hal ini berkaitan dengan cek-riccek kebenaran dari subjek berita. Kebenaran pencantuman sumber berita dan pengutipan data.

### 3. *Completeness* (kelengkapan)

Berita harus memenuhi enam unsur dengan menggunakan rumus 5W+1H agar berita lengkap, akurat, dan sekaligus memenuhi standar teknik jurnalistik. Berita disusun dalam pola yang baku agar isi berita cepat dan mudah dipahami oleh pembaca (Sumadiria, 2006:118). Aspek *Completeness* meliputi peristiwa apa yang terjadi (*what*), kepada siapa peristiwa itu terjadi (*who*), mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi (*why*), kapan peristiwa tersebut terjadi (*when*), dimana peristiwa itu terjadi (*where*), dan bagaimana peristiwa itu terjadi (*how*). Kelengkapan informasi ini penting untuk menunjang pembaca dalam memahami teks berita yang utuh dan benar (Rahayu.ed.,2006:18-19). Unsur 5W+1H merupakan fakta yang paling penting atau paling menarik untuk diketahui pembaca. Fakta yang diperlukan untuk menyusun berita ini adalah standar baku dalam praktik jurnalistik.

#### 4. *Relevance* (relevansi)

Terdapat ukuran-ukuran tertentu agar suatu kejadian atau peristiwa dapat diberitakan oleh pers. Hal ini disebut sebagai kriteria layak berita yaitu bernilainya kejadian tersebut bagi pers (Siregar, 1998:27). Secara umum kejadian yang mempunyai nilai berita atau layak berita mengandung satu atau beberapa unsur berikut ini: *significance*, *magnitude*, *timeliness*, *proximity*, *prominence*, dan *human interest* (Siregar, 1998:27).

- a. *Proximity* (kedekatan), maksud kedekatan disini adalah kedekatan geografis dan psikologis. Kedekatan geografis menunjuk pada suatu peristiwa atau berita yang terjadi di sekitar tempat tinggal. Sedangkan, kedekatan psikologis lebih banyak ditentukan oleh tingkat keterikatan pikiran, perasaan atau kejiwaan seseorang dengan suatu objek peristiwa atau berita.
- b. *Timeliness* yaitu menyangkut hal-hal yang baru terjadi atau baru dikemukakan (Siregar, 1998:28).
- c. *Significance* yaitu kejadian yang berkemungkinan mempengaruhi kehidupan orang banyak atau kejadian yang mempunyai akibat terhadap kehidupan pembaca (Siregar, 1998:27).
- d. *Prominence* berkaitan dengan orang-orang atau individu-individu terkemuka. Ukuran individu yang memiliki *prominence* adalah individu yang memiliki pengaruh luas dalam masyarakat (Rahayu.ed.,2006:21).
- e. *Magnitude* merupakan sebuah fakta atau peristiwa yang memiliki besaran jumlah (Rahayu.ed.,2006:21-22). Dalam penelitian ini, nilai *human interest* tidak digunakan, alasannya karena karakteristik teks berita yang

akan diteliti adalah berita *hard news*. Tema pemberitaan *hard news* menekankan pada nilai berita yang dianggap penting.

Kelima dimensi ini berfungsi untuk mengukur derajat nilai berita. Bila teks pemberitaan dugaan kasus korupsi e-KTP Setya Novanto di media, mengandung setidaknya satu di antara enam unsur di atas maka peristiwa tersebut layak diberitakan, semakin banyak suatu peristiwa mengandung unsur nilai layak berita maka semakin relevan peristiwa tersebut diberitakan kepada khalayak.

#### **5. *Balance* (berimbang)**

Diartikan sebagai keseimbangan dalam pemberitaan. *Balance* diukur dengan menghitung berapa banyak ruang dan waktu yang diberikan media untuk menyajikan pendapat atau kepentingan salah satu pihak. Dalam penelitian ini *balance* diukur berdasarkan tiga elemen yaitu (Rahayu.ed.,2006:27) :

- a. Ada atau tidak ada *source bias* atau penampilan satu sisi dalam pemberitaan. Aspek ini dilihat dari ketidakseimbangan sumber berita yang dikutip dalam peliputan. Dalam menyajikan fakta, media harus menampilkan berbagai sumber yang relevan, baik yang setuju (pro) maupun yang tidak setuju (kontra) untuk memenuhi aspek *balance*. *Source bias* sebagian besar dapat muncul dikarenakan oleh wartawan yang langsung mengutip media lain sebagai sumber berita tunggal tanpa melakukan cek dan ricek. Wartawan tidak berusaha untuk mendapatkan sumber berita yang lain yang berguna untuk memperjelas fakta dalam teks berita.

- b. Ada atau tidak ada *slant* yaitu kecenderungan media (wartawan, editor) yang memberikan kritikan atau pujian secara spesifik dalam pemberitaan. Kritik atau pujian dapat dilihat sebagai bentuk kecondongan media terhadap nilai-nilai tertentu.
- c. *Balance* diukur berdasarkan ada atau tidak ada bentuk-bentuk ketidakseimbangan pemberitaan. Dalam penelitian ini ketidakseimbangan berita akan dilihat dari keseimbangan porsi alinea yang merepresentasikan pendapat pro dan kontra (Rahayu.ed.,2006:22). Keseimbangan dalam pemberitaan adalah elemen standar dalam pemberitaan karena melalui elemen ini posisi organisasi media yang independen ditegaskan.

#### 6. *Neutrality* (kenetralan)

Netralitas berkaitan dengan aspek presentasi suatu berita. Dalam penelitian ini netralitas diukur berdasarkan aspek sensasional yang bertujuan menimbulkan sensasi untuk menarik perhatian orang lain. Netralitas diukur berdasarkan empat hal, yakni sensasional, *stereotype*, *juxtaposition*, dan *linkage* (Rahayu.ed.,2006:24).

- a. Sensasional dapat dilihat melalui dua hal yaitu, terdapat personalisasi yang melihat individu tertentu sebagai aktor utama atau aktor tunggal yang paling berpengaruh dalam sebuah peristiwa. Dramatisasi yaitu penulisan berita yang bersifat hiperbolik dan melebih-lebihkan sebuah fakta dengan maksud menimbulkan efek dramatis (Rahayu.ed.,2006:25).
- b. *Stereotype* yaitu pemberian atribut tertentu terhadap individu, kelompok, atau bangsa dalam penyajian sebuah berita. Penggunaan *stereotype* bermakna positif dan negatif dapat mengundang tuduhan keberpihakan

wartawan atau media terhadap salah satu kelompok yang ada dalam masyarakat (Rahayu.ed.,2006:26).

- c. *Juxtaposition* merupakan penyandingan dua hal yang berbeda. Hal ini dimanfaatkan untuk menambah kesan dramatis pada berita yang disajikan. *Juxtaposition* menggabungkan dua fakta yang tidak berhubungan sehingga terlihat kontras (Rahayu.ed.,2006:26).
- d. *Linkage* menghubungkan dua fakta yang sebenarnya berbeda sehingga kedua fakta tersebut dianggap (diasosiasikan) memiliki hubungan sebab akibat asosiatif (Rahayu.ed.,2006:26). Keempat alat ukur di atas digunakan untuk melihat netralitas yang berkaitan dengan aspek presentasi pemberitaan dugaan kasus korupsi e-KTP Setya Novanto. Netralitas terhadap pemberitaan dilihat dari pemakaian kata-kata yang dapat menimbulkan perasaan sensasional dan perasaan emosional.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk melihat pengaruh dari pemberitaan suatu media yaitu dilihat melalui aspek frekuensi, durasi, intensitas dan aspek kredibilitas sumber yang dilakukan oleh pembaca kepada media yang bersangkutan, sehingga efek dari media massa akan terlihat dengan jelas.

#### **2.4 Kriteria Berita Jurnalistik**

Terdapat sebelas kriteria umum penilaian suatu berita, kesebelas kriteria tersebut adalah sebagai berikut (Sumadiria, 2006:80-92) :

- a. Keluarbiasaan (*unusualness*). Berita adalah sesuatu yang luar biasas. Berita bukanlah sesuatu peristiwa biasa. Semakin besar suatu peristiwa, semakin besar pula nilai berita yang ditimbulkannya. Nilai berita peristiwa luar biasa,



paling tidak dapat dilihat dari lima aspek, yakni lokasi peristiwa, waktu peristiwa, jumlah korban, daya kejut peristiwa dan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut.

- b. Kebaruan (*newness*). Berita adalah apa saja yang disebut hasil karya terbaru, seperti sepeda motor baru, mobil baru, rumah baru, gedung baru, walikota baru, dan lain sebagainya.
- c. Akibat (*impact*). Berita adalah segala sesuatu yang berdampak luas. Suatu peristiwa tidak jarang menimbulkan dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Apa saja yang menimbulkan akibat sangat berarti bagi masyarakat, itulah berita. Semakin besar dampak sosial, budaya, ekonomi, atau politik yang ditimbulkannya, maka semakin besar nilai berita terkandung.
- d. Aktual (*timeliness*). Berita adalah peristiwa yang sedang atau baru terjadi. Berita adalah apa yang terjadi hari ini. Apa yang masih belum diketahui tentang apa yang akan terjadi hari ini. Atau adanya opini berupa pandangan dan penilaian yang berbeda dengan opini sebelumnya sehingga opini itu mengandung informasi penting dan berarti.
- e. Kedekatan (*proximity*). Berita adalah kedekatan, maksud kedekatan disini adalah kedekatan geografis dan psikologis. Kedekatan geografis menunjuk pada suatu peristiwa atau berita yang terjadi di sekitar tempat tinggal. Sedangkan, kedekatan psikologis lebih banyak ditentukan oleh tingkat keterikatan pikiran, perasaan atau kejiwaan seseorang dengan suatu objek peristiwa atau berita.

- f. Informasi (*information*). Berita adalah informasi, setiap informasi belum tentu memiliki nilai berita. Informasi yang tidak memiliki nilai berita tidak layak untuk dimuat, disiarkan atau ditayangkan media massa. Hanya informasi yang memberi manfaat kepada khalayak.
- g. Konflik (*conflict*). Berita adalah konflik atau segala sesuatu yang mengandung unsur dan syarat dengan dimensi pertentangan.
- h. Orang penting (*prominence*). Berita adalah tentang orang-orang penting, ternama, pesohor, selebriti, dan lain sebagainya baik dalam kondisi biasa maupun luar biasa.
- i. Keterkaitan manusiawi (*human interest*). Terkadang suatu peristiwa tidak menimbulkan efek berarti pada seseorang, sekelompok orang atau bahkan lebih jauh lagi pada suatu masyarakat, tetapi lebih menimbulkan getaran pada suasana hati, suasana kejiwaan dan alam perasaannya. Apa saja yang dinilai mengandung minat insani, menimbulkan ketertarikan manusiawi, mengembangkan hasrat dan naluri ingin tahu merupakan salah satu contoh ketertarikan manusiawi.
- j. Kejutan (*surprising*). Kejutan adalah sesuatu yang datangnya tiba-tiba, di luar dugaan, tidak direncanakan, di luar perhitungan dan tidak diketahui sebelumnya. Kejutan bisa menunjuk pada ucapan dan perbuatan manusia, bisa juga menyangkut binatang dan perubahan yang terjadi pada lingkungan alam.

## 2.5 Efek Pesan Media Massa

Komunikasi mempunyai efek tertentu secara umum terdapat tiga efek komunikasi, yaitu : kognitif, afektif, konatif. Efek kognitif meliputi peningkatan kesadaran, belajar, dan tambahan pengetahuan. Efek afektif berhubungan dengan emosi, perasaan, dan *attitude* (sikap). Sedangkan efek konatif berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu (Liliweri, 2004:39), yaitu:

1. Efek kognitif, dimana pesan komunikasi massa mengakibatkan khalayak berubah dalam hal pengetahuan, pandangan dan pendapat terhadap sesuatu yang diperolehnya. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi.
2. Efek afektif, dimana pesan komunikasi massa mengakibatkan berubahnya perasaan tertentu dari khalayak. Orang dapat menjadi lebih marah dan berkurang rasa tidak senangnya terhadap suatu akibat membaca surat kabar, mendengarkan radio atau menonton televisi. Efek ini ada hubungannya dengan emosi, sikap, atau nilai.
3. Efek konatif, dimana pesan komunikasi massa mengakibatkan orang mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Efek ini merujuk pada perilaku nyata yang dapat diminati, yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku.

Dalam analisis efek, efek adalah unsur penting dalam keseluruhan komunikasi. Efek bukan hanya sekedar umpan balik dan reaksi balik penerima terhadap pesan yang disampaikan oleh pihak komunikator, melainkan efek yang dapat menimbulkan baik dalam pengetahuan, sikap, dan tingkah laku secara keseluruhan pada diri penerima. Pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya

Novanto yang kemudian banyak diberitakan media massa dapat menimbulkan respon khalayak untuk menyatakan apakah ia setuju atau tidak terhadap gagasan yang disampaikan media massa.

Bentuk nyata dari pengaruh media terhadap masyarakat adalah munculnya persepsi serta pendapat umum yang berbeda-beda di tengah masyarakat. Opini publik yang muncul akibat dari pemberitaan kasus atau isu-isu tertentu di media massa menggiring khalayak dalam bersikap dan berpikir. Pada akhirnya, dari pers, media, dan publik yang kemudian membentuk suatu opini publik terhadap suatu hal akan menghasilkan sebuah lingkaran sistem komunikasi yang menunjukkan bahwa setiap unsur dalam sistem tersebut saling terkait satu sama lain dan suatu hal yang dihasilkan oleh salah satu unsur akan menyebabkan adanya tanggapan atau *feedback* dari unsur yang lain (Arifin, 2013:165).

## **2.6 Tinjauan Tentang Persepsi**

Kehidupan bermasyarakat tidak akan lepas dari persepsi masyarakat itu sendiri. Persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari seseorang. Persepsi merupakan pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rackhmat, 2011:50).

Menurut (Walgito Bimo, 2002:87) persepsi merupakan suatu proses yang didahului penginderaan yaitu proses stimulus oleh individu melalui proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan diproses selanjutnya merupakan proses persepsi.

Proses persepsi tidak dapat terlepas dari proses penginderaan dan proses tersebut merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Penginderaan sendiri dapat diartikan suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yang disebut indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Dari stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang sesuatu yang diindera kemudian tercipta persepsi.

Dalam penelitian ini, persepsi yang timbul dapat melalui pemberitaan di media yang secara terus-menerus menayangkan berita kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto. Sebagai suatu proses penginderaan, stimulus yang diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat memberikan pandangan, memahami dan dapat mengartikan tentang stimulus yang diterimanya. Stimulus yang diberikan dapat menimbulkan respon khalayak untuk menyatakan apakah ia setuju atau tidak terhadap gagasan yang disampaikan media massa melalui pengetahuan dan pendapat dari pada diri penerima. Persepsi merupakan akar dari opini.

Kepercayaan timbul pertama kali dari persepsi dengan melihat fenomena politik, dari hasil persepsi timbullah interpretasi yang merupakan inti persepsi. Interpretasi tersebut menghasilkan percaya atau tidak percaya, dari persepsi timbullah kognisi atau pengetahuan yang disimpan dalam memori. Memori adalah sistem yang sangat terstruktur, yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya (Schlesinger dan Groves dalam Iskandar Zulkarnain, 2016:140 ).

Setelah interpretasi tersebut menghasilkan percaya atau tidak percaya, maka memori menyimpan data percaya atau tidak percaya tadi. Dari kognisi dalam memori tadi timbullah tindakan (konasi) setelah melalui proses berpikir. Tindakan tersebut berupa hasil dari sikap percaya atau tidak percaya yang kemudian dapat berlanjut ke tahap opini dapat pula dinyatakan melalui perilaku, bahasa tubuh, raut muka, simbol-simbol tertulis, pakaian yang dikenakan, dan oleh tanda-tanda lain yang tak terbilang jumlahnya, melalui referensi, nilai-nilai, pandangan, sikap, dan kesetiaan (Iskandar Zulkarnain, 2016:139-140).

## **2.7 Pengertian Opini Publik**

Opini publik didefinisikan oleh Bernard Henessy dalam (Iskandar Zulkarnain, 2016:177), merupakan suatu kompleksitas pilihan-pilihan yang dinyatakan oleh banyak orang berkaitan dengan suatu isu yang dipandang penting oleh publik. Opini publik itu selalu melibatkan orang banyak yang tertarik untuk memikirkan sesuatu isu dalam waktu yang cukup panjang. Meskipun demikian, istilah “publik” sendiri tidak selalu ditentukan oleh banyaknya jumlah orang yang menganut opini tersebut. Istilah “publik” justru diukur oleh apakah sesuatu opini itu menyangkut isu publik atau tidak.

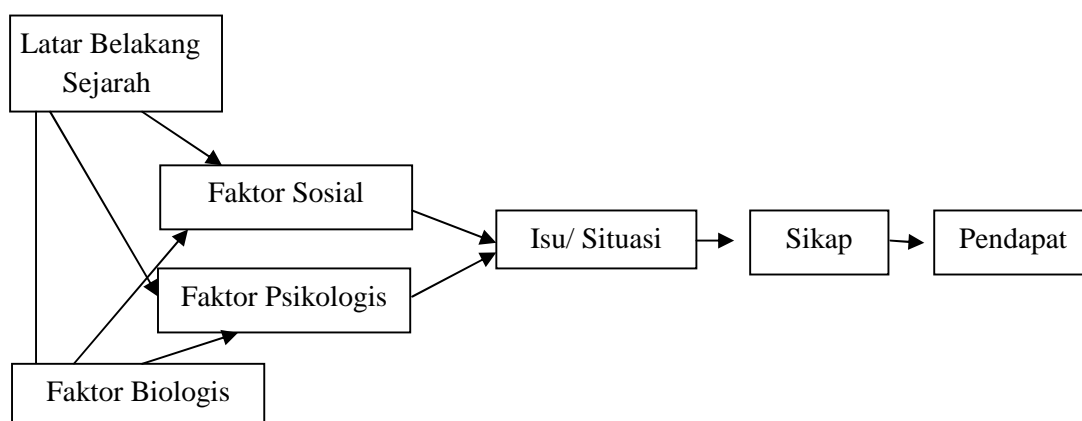
Menurut Nasution dalam (Iskandar Zulkarnain, 2016:177), publik bukan berarti umum. Ia adalah kumpulan orang-orang yang memiliki minat dan kepentingan yang sama terhadap suatu isu. Publik juga ditandai oleh adanya sesuatu isu. Publik juga ditandai oleh adanya sesuatu isu yang dihadapi dan dibincangkan oleh kelompok kepentingan yang dimaksud, yang menghasilkan terbentuknya opini

mengenai isu tersebut. Selain itu, publik juga bersifat kontroversial, sehingga dapat mengundang terjadinya proses diskusi.

Opini publik memegang peranan penting dalam komunikasi politik, meskipun pada praktiknya tidak secara langsung menentukan kebijakan publik yang memang menjadi wewenang lembaga legislatif ataupun eksekutif. Melalui proses komunikasi politik, sesuatu opini dapat berubah menjadi opini publik sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang memprakarsai berlangsungnya komunikasi. Karena sifatnya seperti ini, opini publik dapat direkayasa melalui media massa, ataupun tumbuh ditengah dinamika sosial dan politik. Pada sisi proses, opini publik dapat terbentuk melalui kegiatan komunikasi politik, baik yang dilakukan oleh sumber individual maupun kelompok (Iskandar Zulkarnain, 2016:178-179).

### 2.7.1 Proses Pembentukan Opini Publik

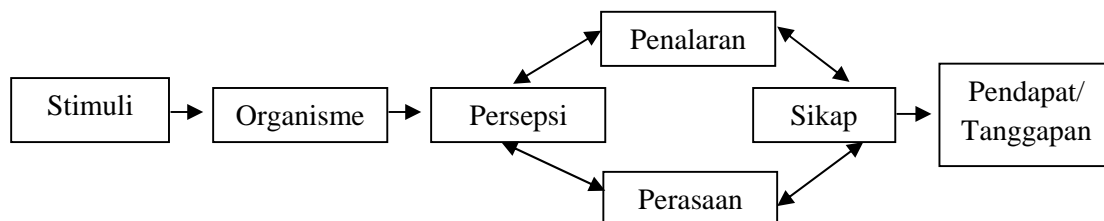
Terbentuknya opini publik dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yakni: latar belakang sejarah, faktor biologis, faktor sosial, faktor psikologis, isu dan situasi, sikap dan pendapat.



**Gambar 1. Proses Pembentukan Opini Publik**

Sumber : Model Pembentukan Opini Publik dalam (Cangara, 2016:135).

Dalam praktik komunikasi, usaha untuk membentuk sikap lebih sulit diubah dari pada pendapat, kalau hal ini terkait dengan norma, pengetahuan, kepercayaan, agama, dan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Oleh karena itu, ada baiknya diperlihatkan bagaimana proses terjadinya pendapat yang didahului stimuli dan persepsi.



**Gambar 2. Opini Publik yang Diawali Stimuli**

Sumber : Model Pembentukan Opini Publik dalam (Cangara, 2016:135).

Dalam studi komunikasi yang diukur dalam bentuk pernyataan adalah pendapat dan bukan persepsi, tapi masih dalam status praduga sementara yang belum dinyatakan. Jadi, analisis persepsi lebih banyak didekati dari perspektif psikologi, sementara analisis pendapat (opini) menjadi kajian komunikasi (Cangara, 2016:137-138).

Setelah suatu opini publik tercipta di tengah masyarakat, tentu menghasilkan efek tertentu bagi masyarakat tersebut. Di era reformasi saat ini atau dapat dikatakan sebagai era serba “kebebasan”, setiap orang menuntut segala macam kebebasan yang bisa didapat. Pers sebagai salah satu pilar demokrasi pun terkadang tanpa disadari berlaku menuntut segala kebebasan, dalam hal ini adalah kebebasan mendapatkan informasi dan menyebarkan informasi. Setelah mendapatkan berita, pers kemudian meletakkan segala macam informasi yang didapat di dalam media. Media kemudian disebar dan dikonsumsi oleh publik. Akhirnya segala hal



yang ada di media mengatur segala bentuk pandangan dan pemikiran publik mengenai suatu peristiwa atau kasus tertentu. Media pun secara tidak disadari memberitakan hal-hal seperti apa yang memang diinginkan oleh publik.

## **2.8 Media Massa dan Opini Publik**

Salah satu fungsi media massa ialah menjadi wacana pembentukan opini publik. Melalui berita, komentar, editorial dan artikel yang dimuat dalam surat kabar, serta wawancara yang dilakukan dalam media televisi dan radio dapat menimbulkan berbagai macam tafsiran dan pendapat yang berbeda-beda dari kalangan pembaca dan pemirsa. Media massa dengan kemampuannya dalam membuat agenda, dapat menimbulkan respon khalayaknya untuk menyatakan apakah ia setuju atau tidak terhadap gagasan yang disampaikan oleh media massa. Oleh sebab itu, media massa tidak hanya bisa dilihat dari aspek sebagai industri hiburan, dan informasi, tetapi juga sebagai sarana pembentuk opini publik. Dengan kemampuan media massa membentuk opini publik, maka aktivitas para pemimpin negara, politisi dan pengambil kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari peran media (Cangara, 2016:155).

Bentuk nyata dari pengaruh media terhadap masyarakat adalah munculnya pendapat umum atau opini publik di tengah masyarakat. Opini publik yang muncul akibat dari pemberitaan kasus atau isu-isu tertentu di media massa menggiring khalayak dalam bersikap dan berpikir. Pada akhirnya, dari pers, media, dan publik yang kemudian membentuk suatu opini publik terhadap suatu hal akan menghasilkan sebuah lingkaran sistem komunikasi yang menunjukkan bahwa setiap unsur dalam sistem tersebut saling terkait satu sama lain dan suatu

hal yang dihasilkan oleh salah satu unsur akan menyebabkan adanya tanggapan atau *feedback* dari unsur yang lain (Arifin, 2013:165).

Istilah opini publik terdiri atas perkataan opini (*opinion*) dan publik (*public*). Istilah publik diartikan sebagai orang banyak yang memiliki perhatian dan ketertarikan dalam membahas masalah sosial politik yang disiarkan oleh media massa. Sedang opini atau pendapat, dipahami sebagai jawaban atas pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi dalam suatu situasi tertentu. Walaupun validitasnya lebih tipis dibandingkan dengan pengetahuan positif, namun opini atau pendapat lebih kuat dari dugaan atau sekedar kesan (Arifin, 2013:166).

Sebagai suatu sistem komunikasi, antara pers dengan media dan keterkaitan keduanya terhadap timbulnya opini publik, keduanya sudah seharusnya berkewajiban dalam memberikan informasi dan berita yang bertanggung jawab, khususnya bila berita tersebut memang dimaksudkan untuk menggiring opini publik maka baik pers maupun media harus benar-benar obyektif dalam membuat pemberitaan dan tanpa adanya bias sedikit pun. Terkadang dengan adanya bias tertentu membuat berita menjadi tidak obyektif dan bila diberikan kepada masyarakat yang kurang kritis dalam menanggapi berita maka berita tersebut akan dianggap sebagai sesuatu yang benar sesuai dengan kacamata media dan pers yang menulis berita.

Media massa mampu mempengaruhi pemikiran dan tindakan khalayak. Budaya, sosial, politik dipengaruhi oleh media. Media massa dikatakan sebagai kebudayaan yang bercerita. Media membentuk opini publik untuk membawanya

pada perubahan. Pesan media tidak jadi begitu saja, tetapi dibuat dan diciptakan oleh media massa dengan tujuan tertentu (Ardianto, 2007:58).

## **2.9 Tinjauan Tentang Kepercayaan Publik**

Kepercayaan publik merupakan hasil penggabungan dari pengetahuan kognitif publik terhadap institusi pemerintah dan para pejabatnya, hubungan emosional publik dengan berbagai institusi pemerintah dan pejabatnya serta penilaian mereka tentang perilaku institusi penyelenggara layanan publik dan kegiatan pemerintahan, interaksi dari ketiganya menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan pejabatnya (Dwiyanto, 2011:16).

*Trust* adalah kepercayaan pihak tertentu terhadap yang lain dalam melakukan hubungan transaksi berdasarkan suatu keyakinan bahwa orang yang dipercayainya tersebut memiliki segala kewajibannya secara baik sesuai yang diharapkan (dalam skripsi Ainurrofiq, 2007:32).

Transaksi yang dimaksudkan pada kalimat di paragraf kedua, adalah dimana pejabat negara dalam hal ini DPR-RI memiliki tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat untuk mengawal pembangunan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Berperan sebagai institusi yang menjalankan fungsi legislasi terutama dalam pembuatan kebijakan publik dan pengawasan akan eksekutif serta bertugas untuk menyerap, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi rakyat (<http://www.dpr.go.id/> diakses pada 22 November 2017). Tugas pokok tersebut harus dipenuhi untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Apabila tugas wajib tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya

maka, dalam hal ini DPR melanggar tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Ba dan Pavlou dalam skripsi Ainurrofiq, 2007:32) mendefinisikan *trust* adalah penilaian hubungan seseorang dengan orang lain yang akan melakukan transaksi tertentu menurut harapan orang kepercayaannya dalam suatu lingkungan yang penuh ketidakpastian. Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya.

Konsep kepercayaan secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *political trust* (kepercayaan politik) dan *social trust* (kepercayaan sosial). Dari perspektif politik, kepercayaan terjadi ketika publik menilai lembaga pemerintah dan para pemimpinnya dapat memenuhi janji, efisien, adil, dan jujur (Blind (2007) dalam Dwiyanto, 2011:355). Jika institusi pemerintah, pejabat publik, dan kebijakan yang dibuatnya dinilai baik oleh publik maka publik akan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah. Publik percaya bahwa pemerintah tidak akan berbuat buruk, melainkan akan selalu melakukan tindakan yang baik meskipun tidak diawasi.

Kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah pada umumnya selalu terkait dengan isu-isu publik. Ketika institusi pemerintah dan para pejabatnya mengambil pilihan yang benar dan sesuai dengan harapan dan aspirasinya, maka publik cenderung menaruh kepercayaan kepada pemerintah. Sebaliknya, ketika respon pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik tertentu dinilai oleh publik

sebagai pilihan kebijakan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan harapannya, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan merosot. Kepercayaan publik secara rasional (*rational trust*) terbentuk ketika publik dan para pemangku kepentingan menilai tindakan yang diambil oleh institusi pemerintah dan para pejabatnya sesuai dengan aspirasi dan harapannya (Dwiyanto, 2011: 355-357).

## **2.10 Faktor Terbentuknya Kepercayaan Publik**

Menurut Solomon E. Asch, kepercayaan dibentuk oleh pengetahuan, kebutuhan, dan kepentingan. Pengetahuan berhubungan dengan jumlah informasi yang dimiliki seseorang. Banyak kepercayaan didasarkan pada pengetahuan yang tidak lengkap. Membangun kepercayaan pada orang lain bukanlah merupakan hal yang mudah. Itu tergantung pada perilaku kita dan kemampuan orang lain untuk percaya dalam mengambil resiko. Faktor yang mempengaruhi kepercayaan individu dalam mengembangkan harapannya mengenai bagaimana seseorang dapat percaya kepada orang lain, bergantung pada faktor-faktor di bawah ini (Muttaqien, 2016:5-6) :

- a. Predisposisi (keadaan yang mudah terpengaruh). Setiap individu memiliki predisposisi yang berbeda untuk percaya kepada orang lain. Semakin tinggi tingkat predisposisi individu terhadap kepercayaan maka semakin besar pula harapan untuk dapat mempercayai orang lain.
- b. Reputasi dan *Stereotype*. Meskipun individu tidak memiliki pengalaman langsung dengan orang lain, harapan individu dapat terbentuk melalui apa yang dipelajari dari teman ataupun dari apa yang telah didengar. Reputasi orang lain biasanya membentuk harapan yang kuat yang membawa individu

untuk melihat elemen untuk percaya atau tidak percaya serta membawa pada pendekatan hubungan untuk saling percaya.

c. Pengalaman Aktual

Pada kebanyakan orang, individu membangun fase dari pengalaman untuk berbicara, bekerja, berkoordinasi dan berkomunikasi. Beberapa dari fase tersebut sangat kuat di dalam kepercayaan, dan sebagian kuat di dalam ketidakpercayaan. Sepanjang berjalannya waktu, baik elemen kepercayaan (*trust*) maupun ketidakpercayaan (*distrust*) memulai untuk mendominasi pengalaman, untuk menstabilkan dan secara mudah mendefinisikan sebuah hubungan. Ketika polanya sudah stabil, individu cenderung untuk menggeneralisasikan sebuah hubungan dan menggambarkannya dengan tinggi atau rendahnya kepercayaan atau ketidakpercayaan.

d. Orientasi psikologis

Individu membangun dan mempertahankan hubungan sosial berdasarkan orientasi psikologisnya. Orientasi ini dipengaruhi oleh hubungan yang terbentuk dan sebaliknya. Dalam artian, agar orientasinya tetap konsisten, maka individu akan mencari hubungan yang sesuai dengan jiwa mereka. Membangun kepercayaan pada orang lain merupakan hal yang tidak mudah. Itu tergantung pada perilaku kita dan kemampuan orang lain untuk percaya dan mengambil resiko.

### **2.11 Pengaruh Media Massa terhadap Kepercayaan Publik**

*Trust* dapat berubah dari waktu ke waktu, karena orang yang terlibat di dalam *trust* tersebut juga pasti akan mengalami perubahan. *Trust* bukan suatu jaminan untuk tidak dapat berubah karena keadaan bisa menghilangkan kemampuan seseorang untuk percaya pada suatu hal. Di dalam interaksi nyata, kita tidak akan pernah mendapatkan interaksi yang benar-benar sama dalam suatu waktu, dengan begitu suatu keadaan tertentu bisa saja mempengaruhi kepercayaan seseorang pada orang yang ia percayai.

*Trust* berubah bukan hanya karena adanya suatu pengalaman tertentu. Belum tentu suatu pengalaman yang menyenangkan akan meningkatkan *trust* dan sebaliknya, tetapi juga dengan adanya modifikasi dari berbagai sumber *trust* tersebut, misalnya pengalaman langsung di masa lalu, reputasi *trustee* (bagaimana pengalaman dan opini orang lain mempengaruhi kepercayaan *trustier* kepada *trustee*), perubahan sikap dan perilaku dari orang yang kita percayai, keadaan emosional *trustier*, dan dengan adanya modifikasi dari lingkungan yang menuntut seseorang untuk berperilaku tertentu. *Trust* juga bisa berubah karena adanya suatu faktor sebab akibat (*causal attribution*), kepercayaan seseorang kepada orang lain akan bergantung pada bagaimana orang lain tersebut berperilaku dan sebaliknya. (Muttaqien, 2016:9-10).

Kepercayaan merupakan dasar dalam membangun suatu hubungan antar individu, kelompok atau institusi. Dalam konteks kehidupan demokrasi, kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik menjadi sangat penting dan vital. Institusi yang mendapatkan kepercayaan masyarakat akan memiliki legitimasi dan

kewibawaan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap institusi publik lebih memiliki kemauan untuk terlibat dalam segala aktifitas kehidupan yang diselenggarakan institusi publik.

Kepercayaan publik merupakan hasil penggabungan dari pengetahuan kognitif publik tentang karakteristik institusi pemerintah dan para pejabatnya, hubungan emosional publik dengan berbagai institusi pemerintah dan pejabatnya serta penilaian mereka tentang perilaku institusi penyelenggara layanan publik dan kegiatan pemerintahan, interaksi dari ketiganya menentukan tingkat kepercayaan warga terhadap institusi pemerintah dan pejabatnya (Dwiyanto, 2011:16). Media massa dengan kemampuannya dalam membuat agenda, dapat menimbulkan respon khalayaknya untuk menyatakan apakah ia setuju atau tidak terhadap gagasan yang disampaikan oleh media massa.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu fungsi media massa ialah menjadi wacana pembentukan opini publik. Melalui berita, komentar, editorial dan artikel yang dimuat dalam surat kabar, internet serta wawancara yang dilakukan dalam media televisi dan radio dapat menimbulkan berbagai macam tafsiran dan pendapat yang berbeda-beda dari kalangan pembaca dan pemirsa.

Dalam penelitian ini, kepercayaan terhadap pemerintah yang seharusnya berarti pula kepercayaan terhadap lembaga negara yang berwenang melaksanakan tugasnya dan mengatur berjalannya suatu sistem dalam negara. Seorang pejabat negara harus selalu menjaga integritas institusinya, berperilaku jujur, kooperatif menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kode etik yang berlaku serta tidak melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Menjadi



seorang pemimpin dalam sebuah institusi negara yang di setiap kegiatan, ataupun perilakunya selalu disoroti publik, dalam hal ini media massa sangat berperan penting dalam menyoroti fakta yang terjadi. Berbagai macam prestasi maupun pelanggaran yang terjadi di dalam institusi negara berdampak pada kepercayaan publik dan membentuk opini publik yang berbeda-beda.

Bagaimanapun juga komunikasi massa mempunyai efek tertentu. Secara umum terdapat tiga efek dari komunikasi massa, berdasarkan teori hierarki efek, yaitu efek kognitif (pesan komunikasi massa mengakibatkan publik berubah dalam hal pengetahuan, pandangan dan pendapat terhadap suatu yang diperolehnya), efek afektif (pesan komunikasi massa mengakibatkan berubahnya perasaan tertentu dari publik), dan efek konatif (pesan komunikasi massa mengakibatkan orang mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu) (Liliweri, 2004:37).

Bentuk nyata dari pengaruh media terhadap publik adalah munculnya pendapat umum atau opini publik di tengah masyarakat. Opini publik yang muncul akibat dari pemberitaan kasus atau isu-isu tertentu di media massa menggiring khalayak dalam bersikap dan berpikir. Pada akhirnya, dari pers, media, dan publik yang kemudian membentuk suatu opini publik terhadap suatu hal akan menghasilkan sebuah lingkaran sistem komunikasi yang menunjukkan bahwa setiap unsur dalam sistem tersebut saling terkait satu sama lain dan suatu hal yang dihasilkan oleh salah satu unsur akan menyebabkan adanya tanggapan atau *feedback* dari unsur yang lain. Sejalan dengan hal tersebut, media massa sangat berperan penting dalam penyebaran setiap informasi, dan dapat menimbulkan efek komunikasi

serta mampu melunturkan kepercayaan publik apabila tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat negara menyalahi aturan demi keuntungan pribadi.

## **2.12 Dimensi Kepercayaan Publik**

Kepercayaan merupakan atribut utama yang dikaitkan dengan kepemimpinan, jika kepercayaan ini luntur, dampaknya bisa serius terhadap kinerja institusi (Robbins dan Judge, 2008:98). Dimensi penting yang mendasari konsep kepercayaan terdapat empat dimensi yaitu:

### **1. Integritas**

Integritas didukung oleh 6 pilar karakter yang terdiri dari kejujuran, keadilan, kepedulian, kearifan, hemat, dan tanggung jawab. Integritas untuk menunjukkan komitmen akan melaksanakan tata kelola pemerintah, perusahaan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel guna menekan tingkat penyimpangan termasuk perbuatan-perbuatan koruptif sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Isi Fakta Integritas adalah:

1. Konsekuen dan konsisten dengan komitmen
2. Menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
3. Transparan dan ada kesamaan pemahaman tentang fakta integritas
4. Bersedia dipantau organisasi yang partisipatif dan independen
5. Memberikan *punishment* dan *reward* yang objektif

Pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi biasanya memiliki sikap jujur menjaga komitmen dan berperilaku konsisten. Integritas mutlak diperlukan dalam kepemimpinan.

## **2. Kompetensi**

Persyaratan penting bagi efektifitas atau kesuksesan pemimpin dalam mengemban peran, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing adalah kompetensi. Kompetensi dalam kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin yang tampak pada sikapnya yang sesuai dengan kebutuhan kerja dalam parameter lingkungan organisasi atau perusahaan dan memberikan hasil yang diinginkan.

Kompetensi dapat dinyatakan sebagai bagian dari kepribadian individual yang bersifat permanen yang dapat menentukan atau memprediksikan kinerja seseorang. Kompetensi merupakan sesuatu yang sangat signifikan. Seseorang yang kompeten akan dianggap pantas untuk jadi pemimpin oleh orang lain, orang yang kompeten akan disegani dan diikuti oleh orang-orang yang ada disekitarnya, dan hal itu akan mendorong terciptanya sebuah kepemimpinan yang sukses.

## **3. Loyalitas (kesetiaan)**

Loyalitas atau kesetiaan merupakan salah satu unsur yang digunakan dalam penilaian yang mencakup kesetiaan terhadap pekerjaannya, jabatannya dan organisasi. Loyalitas kepada pekerjaan tercermin pada sikap yang mencurahkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, disiplin serta jujur dalam bekerja, sikap sebagai bagian dari perusahaan yang paling utama adalah loyal. Sikap ini diantaranya

tercermin dari terciptanya suasana yang menyenangkan dan mendukung ditempat kerja, menjaga citra lembaga dan adanya kesediaan untuk bekerja dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Definisi-definisi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa loyalitas tercermin dari sikap dan perbuatan mencurahkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, disiplin, serta jujur dalam bekerja, menciptakan hubungan kerja yang baik dengan atasan, rekan kerja, serta bawahan dalam menyelesaikan tugas, menciptakan suasana yang mendukung dan menyenangkan di tempat kerja, menjaga citra lembaga.

#### **4. Keterbukaan (transparansi)**

Menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Menurut Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu :

1. Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan
3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktik KKN.

Menurut Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggung jawaban para pembuat kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Terdapat 6 prinsip transparansi yaitu (Ar. Mustopadidjaja, 2003:261):

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan
5. Website atau media publikasi organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

### **2.13 Landasan Teori**

Penelitian ini model yang digunakan adalah model S-O-R. Sesuai dengan namanya, teori ini memiliki tiga elemen yakni pesan (*stimulus*), penerima (*organism*), dan respon (*response*). Stimulus adalah sumber rangsangan, *organism* adalah penerima rangsangan, dan respon adalah umpan balik yang dihasilkan.

Teori S-O-R sebagai singkatan dari *Stimulus-Organism-Response* ini semula berasal dari psikologi, yang kemudian juga menjadi teori komunikasi. Karena itu tidaklah mengherankan karena objek material dari psikologi dan komunikasi

adalah sama, yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen seperti sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi, dan *behavioral* (Effendy, 2003:254).

Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) seorang behavioristik terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus-respons dan hal ini yang dikenang darinya hingga kini, kemudian DeFleur menambahkan Organisme dalam bagiannya sehingga menjadi *Stimulus-Organism-Response* (S-O-R). Paradigma DeFleur sangat cocok digunakan dalam mengkaji tanggapan khalayak (Mar'at, 1982:86).

Menurut model ini, organisme menghasilkan perilaku tertentu jika ada kondisi stimulus tertentu pula, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Pola S-O-R ini dapat berlangsung secara positif atau negatif, misalnya jika orang tersenyum akan dibalas tersenyum ini merupakan reaksi positif, namun jika tersenyum dibalas dengan palingan muka maka ini merupakan reaksi negatif.

Respon dalam teori S-O-R dapat diasumsikan sebagai sebuah efek timbal balik yang dihasilkan oleh media. Dalam teori *effect* memfokuskan pada efek yang ditimbulkan pada khalayak setelah menggunakan media tersebut. Hal ini berkaitan dengan bagaimana media mengolah suatu pesan agar dapat tersampaikan kepada khalayaknya. Dengan demikian media akan mampu untuk mempengaruhi khalayak sebagai suatu akibat dari efek yang ditimbulkan. Hasil dari sebuah komunikasi massa dan beberapa kaitannya dengan penggunaan media akan membawa pada bagian terpenting berikutnya dari teori ini.

Mengutip pendapat Hovland, Janis dan Kelley yang menyatakan bahwa dalam teori *effect* terdapat 3 tahap respon yang dialami oleh komunikan organism.

Adapun tahap-tahap respon adalah:

- a. Tahap kognitif yaitu meliputi perhatian, ingatan terhadap pesan, kesadaran atau pengenalan terhadap pesan dan pengetahuan terhadap pesan tersebut.
- b. Tahap afektif meliputi kesediaan untuk mencari lebih banyak lagi informasi, evaluasi terhadap pesan, dan minat untuk mencoba.
- c. Tahap konasi atau behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan (Mar'at, 1982:87).

Pada prosesnya perubahan sikap dapat berubah, jika hanya stimulus yang menerpa benar-benar melebihi stimulus semula. Prof. Dr. Ma'rat dalam bukunya "Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukurannya", mengutip pendapat Hovland, Janis dan Kelley yang menyatakan bahwa dalam menelaah sikap yang baru ada tiga variabel penting yaitu :

- a. Perhatian, komunikasi terjadi jika ada perhatian dari komunikan.
- b. Pengertian, bagaimana komunikan mengerti akan stimuli yang diberikan.
- c. Penerimaan, hal ini jika komunikan telah mengolah stimuli dan menerimannya, maka terjadilah kesediaan untuk mengubah sikap.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi teori S-O-R (Framanik, 2012 : 58):

- a. Komunikator, hal ini berkaitan dengan siapa yang memberikan stimuli, seorang komunikator dituntut untuk memiliki kredibilitas yang tinggi, kemampuan berkomunikasi yang memadai, dan juga daya tarik yang dapat menarik perhatian komunikan.

- b. Media, agar pesan atau gagasan dapat mudah diterima oleh komunikan maka seorang komunikator harus mampu menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik komunikan, hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pemahaman.
- c. Karakteristik komunikan (organisme), faktor ini sangat menentukan apakah gagasan yang disampaikan akan diterima atau tidak, sehingga pendalaman terhadap komunikan akan memungkinkan tingkat keberhasilan stimuli yang diberikan sangat besar.

Hambatan atau gangguan teori S-O-R, hambatan ini sebenarnya berlaku untuk semua kegiatan komunikasi, namun karena teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi sehingga hambatannya akan mengalami kesamaan. Terdapat beberapa jenis gangguan terhadap jalannya komunikasi yang menurut sifatnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Effendy, 2003:45):

- a. Gangguan Mekanik

Gangguan mekanik berupa gangguan fisik, yang disebabkan oleh adanya suara atau kebisingan lain di sekitar tempat pemberian stimulus dilakukan. Misalnya suara mobil yang lalu lalang, suara musik dari luar, dll.

- b. Gangguan Semantik

Gangguan semantik berupa gangguan disebabkan oleh adanya perbedaan makna yang dipahami oleh sumber dan penerima. Gangguan ini biasanya berhubungan dengan keterbatasan atau perbedaan bahasa, misalnya perbedaan pemahaman mengenai kata-kata verbal, isyarat nonverbal, simbol-simbol tertentu akan merangsang orang lain memberikan respon dengan cara tertentu.



- c. Kepentingan, komunikan akan selektif dalam menerima pesan/ stimulus yang diberikan berdasarkan kepentingannya.
- d. Motivasi Terpendam, mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kekurangannya. Perbedaan motivasi dapat menjadi penghambat keberhasilan penerapan teori S-O-R. Ketika motivasi yang terkandung dalam stimulus yang diberikan komunikator sesuai dengan motivasi komunikan, maka stimulus akan diterima. Jika tidak sesuai, komunikan akan mengabaikannya. Semakin sesuai stimulus yang diberikan dengan motivasi yang dimiliki komunikan, akan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerapan teori S-O-R ini.
- e. Prasangka, berkaitan dengan rasa curiga yang timbul dalam diri komunikan. Prasangka bisa menjadi hambatan yang sangat berat dalam keberhasilan teori S-O-R, sebab rasa curiga akan membuat komunikan bersikap menentang komunikator, bahkan sebelum komunikator menyampaikan apapun. Prasangka dapat timbul pada etnis, agama, pandangan politik, atau kelompok tertentu.
- f. Evasi Komunikasi, berkaitan dengan gejala mencemooh atau mengelakkan pesan (stimulus) yang diberikan komunikator dengan tujuan untuk mendiskreditkan pesan tersebut.

Model inilah yang kemudian mempengaruhi suatu teori klasik komunikasi yaitu *Hypodermic Needle* atau teori jarum suntik. Dalam proses perubahan sikap pada hakekatnya sama dengan proses belajar. Proses perubahan sikap tersebut menggambarkan proses belajar pada individu (Effendy, 2003:255), yang terdiri dari :

- a. Stimulus (rangsang) yang diberikan pada organisme dapat diterima atau ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak berarti stimulus itu tidak efektif mempengaruhi perhatian individu dan berhenti disini. Tetapi bila stimulus diterima oleh organisme berarti ada perhatian dari individu dan stimulus tersebut efektif.
- b. Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organisme (diterima) maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses berikutnya.
- c. Setelah itu organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya (bersikap).
- d. Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut (perubahan sikap).

Dalam menyakinkan organisme ini, faktor *reinforcement* (penguatan) memegang peranan penting. Model inilah yang kemudian mempengaruhi suatu teori klasik komunikasi yaitu *Hypodermic Needle* atau teori jarum suntik. Dalam proses perubahan sikap pada hakekatnya sama dengan proses belajar. Teori peluru ini merupakan konsep awal sebagai efek komunikasi massa yang oleh para teoritis komunikasi tahun 1970-an dinamakan pula *hypodermic needle theory* yang dapat diterjemahkan pula teori jarum hipodermik (Effendy, 2003:264).

Model ini banyak ditemukan pada riset mengenai pengaruh atau efek media terhadap khalayak. Media dianggap mempunyai pengaruh yang tidak terbatas, karena itu sering dijumpai pada riset eksperimen yang berusaha menerangkan pengaruh variabel yang satu terhadap yang lain.

Dalam hubungannya dengan komunikasi massa, istilah “*hypodermic needle model*” beranggapan bahwa media massa menimbulkan efek yang kuat, terarah, segera dan langsung itu adalah sejalan dengan pengertian “perangsang tanggapan (*stimulus-response*)” yang mulai dikenal sejak penelitian ilmu jiwa pada tahun 1930-an (Effendy. 2003:84). Dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Komunikasi* (Jalaluddin, Rakhmat. 2007:62) mengatakan bahwa :

*Model ini mempunyai asumsi bahwa komponen-komponen komunikasi (komunikator, pesan, media) amat perkasa dalam mempengaruhi komunikasi. Disebut model jarum hipodermik karena dalam model ini dikesankan seakan-akan komunikasi “disuntikkan” langsung ke dalam jiwa komunikan. Sebagaimana obat disimpan dan disebar dalam tubuh sehingga terjadi perubahan dalam sistem fisik, begitu pula pesan-pesan persuasif mengubah sistem psikologi. Model ini sering juga disebut “bullet theory” (teori peluru) karena komunikan dianggap secara pasif menerima berondongan pesan-pesan komunikasi.*

*Teori ini disamping mempunyai pengaruh yang sangat kuat juga mengasumsikan bahwa para pengelola media dianggap sebagai orang yang lebih pintar dibanding audience. Teori ini mengasumsikan media massa mempunyai pemikiran bahwa audience bias ditundukkan sedemikian rupa atau bahkan bias dibentuk dengan cara apapun yang dikehendaki media (Aziz Alimul, Hidayat. 2007:166).*

Teori ini mengatakan bahwa rakyat benar-benar rentan terhadap pesan-pesan komunikasi massa, apabila pesan “tepat sasaran”, ia akan mendapatkan efek yang diinginkan. Model ini berasumsi bahwa komponen-komponen komunikasi (komunikator, pesan, media) mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam mengubah sikap dan perilaku khalayak (Kriyantono. 2007:202). Dalam model ini dikesankan bahwa seakan-akan komunikasi disuntikkan langsung ke dalam jiwa komunikan sehingga pesan-pesan persuasif mengubah sistem psikologis komunikan.

Berdasarkan kedua model teori diatas, teori utama yang digunakan pada penelitian ini adalah teori *Hypodermic Needle* atau teori Jarum Suntik. Meninjau tentang fenomena yang tengah diteliti mengenai pengaruh pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto di media terhadap tingkat kepercayaan publik pada DPR-RI, maka peneliti tertarik untuk menggunakan teori Jarum Suntik ini sebagai dasar acuan. Dalam teori Jarum Suntik diasumsikan organisme atau individu sebagai objek yang pasif dalam menerima pesan-pesan dari media. Karena sebuah pesan-pesan yang terkandung dalam sebuah pemberitaan yang melibatkan pejabat negara dapat menjadi stimulus yang merangsang perilaku seseorang, dalam hal ini berupa tingkat kepercayaan publik pada pejabat negara. Menitikberatkan pada pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto di media yang berupa tayangan berita sebagai stimulus. Peneliti akan menganalisis seberapa besar hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku publik dalam hal kepercayaan pada DPR-RI. Tentunya hal ini akan dihitung berdasarkan data-data hasil survei yang didapat oleh peneliti di lapangan.

#### **2.14 Kerangka Pikir**

Kebutuhan akan informasi berhubungan erat dengan media. Media berfungsi sebagai alat bantu untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima, dengan kata lain agar informasi bisa didapatkan oleh khalayak. Penelitian ini berkaitan dengan pengaruh media massa, yang secara khusus mengambil beberapa media yaitu media internet, media elektronik (televisi, portal berita), dan media cetak sebagai obyek penelitian untuk mengetahui apakah pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto di media berpengaruh terhadap tingkat

kepercayaan publik pada DPR-RI. Pada penelitian ini Teori Jarum Suntik penulis gunakan untuk mendukung penelitian ini, teori ini dapat memberikan kontribusi penting mengenai respon publik (mahasiswa) terhadap pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto di Media. Dalam tanggapan objek, sikap individu akan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, keyakinan, proses belajar, dan hasil proses respon ini akan menjadi pendapat atau keyakinan individu mengenai objek sikap dan ini berkaitan dengan segi kognitif. Afektif akan menggiring hasil konatif terhadap objek sikap sebagai aspek evaluatif yang dapat bersifat positif dan negatif.

Pemberitaan Kasus Dugaan Korupsi E-KTP Setya Novanto saat menjabat ketua DPR-RI di media menjadi variabel bebas (X) yang akan diteliti pada penelitian ini, dengan mengacu pada 3 aspek penilaian terhadap pemberitaan di media yaitu:

- a. Durasi penggunaan media, pengukuran durasi media yaitu dengan menghitung berapa lama khalayak mengakses media (berapa jam sehari) atau berapa lama (menit) khalayak mengakses media.
- b. Frekuensi penggunaan media, frekuensi penggunaan media berkaitan dengan tingkat keseringan khalayak dalam menonton, membaca sebuah berita apakah itu berita harian, mingguan, bulanan atau tahunan.
- c. Kredibilitas sumber, media berita tidak bisa lepas dari aspek kredibilitas yang harus selalu dipertahankan. Kredibilitas media atau sumber sangat penting bagi audiens. Ada dua macam kredibilitas, yaitu kredibilitas terhadap sumber dan kredibilitas terhadap media. Kredibilitas terhadap sumber berkaitan dengan kepercayaan individu yang menulis berita tersebut, sedangkan kredibilitas media berkaitan dengan kesatuan yang

lebih luas, seperti stasiun televisi, koran, dan tentunya media online (dalam jurnal Kovacic, dkk, 2010: 116). Jadi kredibilitas dilihat dari individu dan media itu sendiri.

Kredibilitas media dapat dilihat dari hasil evaluasi sumber informasi, pesan itu sendiri, atau pada kombinasi antara sumber dengan pesan. Maka yang dimaksud kredibel atau tidaknya media dapat ditentukan dari sumber dan isi pesan yang disampaikan. Jika sumbernya sesuai dan pesan yang disampaikan benar maka dapat dikatakan informasi tersebut kredibel (dalam jurnal Metzger dan Flanagin 2013:211).

Publik dalam hal ini mahasiswa adalah sebagai penerima pesan pada pemberitaan tersebut yang disiarkan melalui media massa, dengan banyaknya stimulus yang diterima oleh publik mampu mengubah sistem psikologis komunikannya terhadap tingkat kepercayaan publik pada DPR RI. Kemudian variabel terikat (Y) inilah yang akan diteliti pada penelitian ini dengan mengacu pada 4 aspek penilaian terhadap tingkat kepercayaan publik yaitu (Robbin dan Judge, 2008:98) :

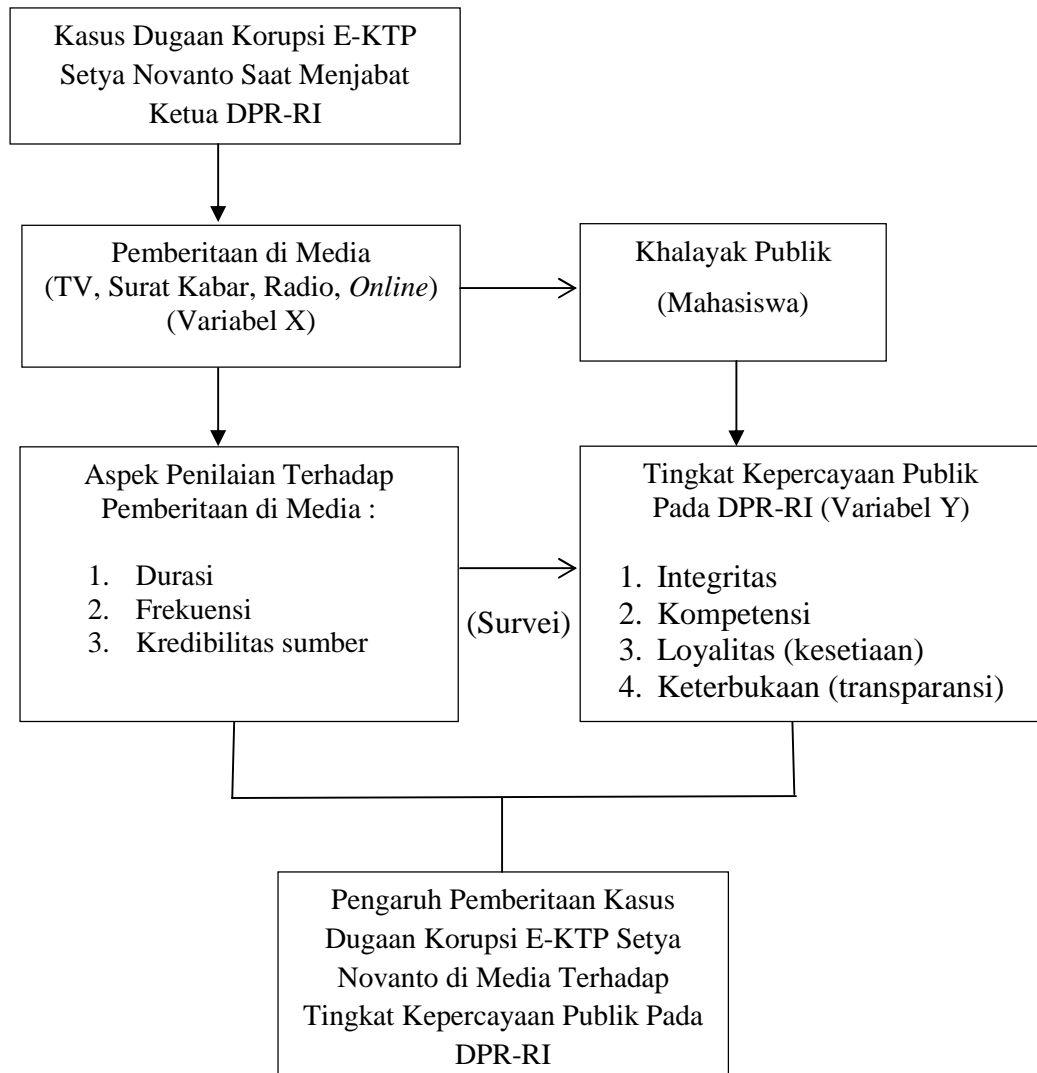
1. Integritas. Menurut UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menyatakan bahwa sebagai pejabat negara, sudah seharusnya menjaga integritasnya untuk menunjukkan komitmen akan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel guna menekan tingkat penyimpangan termasuk perbuatan-perbuatan koruptif.

2. Kompetensi dalam kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin yang tampak pada sikapnya sesuai dengan kebutuhan kerja di lingkungan lembaga atau institusi dan memberikan hasil yang diinginkan.
3. Loyalitas (kesetiaan), tercermin pada kemampuan dan keahlian yang dimiliki, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, disiplin, jujur dalam bekerja, serta menjaga citra lembaga.
4. Keterbukaan (transparansi), adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. (Kristianten, 2006:45) :

Meninjau dari fenomena yang tengah diteliti mengenai pengaruh pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto di media terhadap tingkat kepercayaan publik pada DPR-RI. Penelitian ini menggunakan teori Jarum Suntik ini sebagai dasar acuan. Dalam teori Jarum Suntik diasumsikan organisme atau individu sebagai objek yang pasif dalam menerima pesan-pesan dari media. Karena pesan-pesan yang terkandung dalam sebuah pemberitaan dimana melibatkan pejabat negara dapat menjadi stimulus yang menimbulkan respon berupa tanggapan seseorang, dalam hal ini berupa tingkat kepercayaan publik pada lembaga DPR-RI.

Menitikberatkan pada pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto di media yang berupa tayangan berita sebagai stimulus. Peneliti akan menganalisis seberapa besar hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik pada

DPR-RI. Tentunya hal ini akan dihitung berdasarkan data-data hasil survei yang didapat oleh peneliti di lapangan.



**Gambar 3. Bagan Kerangka Pikir**

Sumber : Modifikasi oleh peneliti, Desember 2017



### 2.15 Hipotesis

Perumusan hipotesis bertujuan untuk memberikan arah bagi peneliti tentang penelitian yang akan dilaksanakan. Selain itu, hipotesis juga bertujuan untuk mencegah peneliti untuk melakukan penelitian coba-coba (*trial and error research*) yaitu penelitian untung-untungan dengan harapan menemukan sesuatu yang penting (Morissan, 2014:18). Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

Ho : Tidak ada pengaruh pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto di media terhadap tingkat kepercayaan publik pada DRR-RI.

Ha : Ada pengaruh pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto di media terhadap tingkat kepercayaan publik pada DPR-RI.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan analisis statistik, bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang disusun dengan data kuantitatif serta membuat ketetapan pengukurannya dengan menggunakan metode statistik sebagai alat ukurnya (Singarimbun dan Effendi, 2001:5).

#### **3.2 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual. Metode survei dengan menggunakan kuesioner sebagai *instrument* pengumpulan datanya, dengan tujuan memperoleh informasi dari sejumlah responden yang dianggap mewakili sejumlah populasi tertentu (Kriyantono, 2007:60).

### 3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan batas terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian, sehingga tujuan dan arahnya tidak menyimpang. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

#### a. Pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto di media

Pemberitaan berasal dari kata berita yang ditambahkan imbuhan pem-an. Dimana berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online yang berarti proses, cara, perbuatan, memberitakan, perkabaran, dan maklumat (<http://kbbi.web.id/pemberitaan> diakses pada 2 Desember 2017). Jadi, pemberitaan adalah proses laporan atau pemberitahuan kepada khalayak mengenai terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan yang bersifat umum, baru saja terjadi disampaikan oleh wartawan dan disiarkan melalui media massa secara berkelanjutan (Husnun Djuraid, 2006:11).

Terdapat 3 aspek penilaian pemberitaan di media, yaitu (Pawito, 2008:263) :

- a. Durasi penggunaan media, pengukuran durasi media yaitu dengan menghitung berapa lama khalayak mengakses media (berapa jam sehari) atau berapa lama (menit) khalayak mengakses media.
- b. Frekuensi penggunaan media, frekuensi penggunaan media berkaitan dengan tingkat keseringan khalayak dalam menonton, membaca sebuah berita perminggu.
- c. Kredibilitas sumber, media berita tidak bisa lepas dari aspek kredibilitas yang harus selalu dipertahankan. Kredibilitas media atau sumber sangat penting bagi audiens. Ada dua macam kredibilitas, yaitu kredibilitas terhadap sumber dan kredibilitas terhadap media. Kredibilitas terhadap

sumber berkaitan dengan kepercayaan individu terhadap penulis berita tersebut, sedangkan kredibilitas media berkaitan dengan kesatuan yang lebih luas, seperti stasiun televisi, koran, dan tentunya media online (dalam jurnal Kovacic, dkk, 2010: 116).

Jurnal penelitian Metzger dan Flanagin 2013:211 menyatakan kredibilitas media dapat dilihat dari hasil evaluasi sumber informasi, pesan itu sendiri, atau pada kombinasi antara sumber dengan pesan. Maka yang dimaksud kredibel atau tidaknya media dapat ditentukan dari sumber dan isi pesan yang disampaikan. Jika sumbernya sesuai dan pesan yang disampaikan benar maka dapat dikatakan informasi tersebut kredibel.

#### **b. Tingkat Kepercayaan Publik Pada DPR-RI**

Kepercayaan publik merupakan hasil penggabungan dari pengetahuan kognitif warga tentang karakteristik jati diri institusi pemerintah dan para pejabatnya, hubungan emosional warga dengan berbagai institusi pemerintah dan pejabatnya serta penilaian mereka tentang perilaku institusi penyelenggara layanan publik dan kegiatan pemerintahan, interaksi dari ketiganya menentukan tingkat kepercayaan warga terhadap institusi pemerintah dan pejabatnya (Dwiyanto, 2011:16).

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah pada umumnya terkait dengan isu-isu publik tertentu. Ketika institusi pemerintah dan para pejabatnya mengambil pilihan yang benar dan sesuai dengan harapan dan aspirasi rakyat, maka warga cenderung menaruh kepercayaan kepada pemerintah. Sebaliknya, ketika respon pemerintah dalam menyelesaikan

masalah publik tertentu dinilai oleh warga sebagai pilihan kebijakan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan harapan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan merosot (Dwiyanto, 2011:355-357).

Dalam hal ini menjelaskan, dimensi penting yang mendasari konsep kepercayaan terdapat empat dimensi yaitu (Robbin dan Judge, 2008:98) :

1. Integritas. Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menyatakan bahwa sebagai pejabat negara, sudah seharusnya menjaga integritasnya untuk menunjukkan komitmen akan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel guna menekan tingkat penyimpangan termasuk koruptif.
2. Kompetensi dalam kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin yang tampak pada sikapnya sesuai dengan kebutuhan kerja di lingkungan lembaga atau institusi dan memberikan hasil yang diinginkan.
3. Loyalitas (kesetiaan), tercermin pada kemampuan dan keahlian yang dimiliki, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, disiplin, jujur dalam bekerja, serta menjaga citra lembaga.
4. Keterbukaan (transparansi), adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu :
  1. Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat
  2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan

3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktik KKN (Kristianten, 2006:45).

### 3.4 Definisi Operasional

Menurut Singarimbun dan Effendi (2001:123), definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dalam penelitian ini, terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas (x) dan variabel terikat (y). Variabel bebas dari penelitian ini yaitu pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto di media. Sedangkan variabel terikatnya yaitu tingkat kepercayaan publik pada DPR-RI. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

**Tabel 4. Definisi Operasional Penelitian**

Variabel (X)	Dimensi	Indikator	Skala
Pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto di media	Durasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durasi mengakses berita di media (berapa jam sehari); atau berapa lama (menit)</li> </ul>	Likert
	Frekuensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frekuensi mengakses berita di media dalam seminggu</li> <li>Kepuasan pada isi berita di media</li> <li>Kemudahan dalam mengakses berita di media</li> </ul>	
	Kredibilitas Sumber	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kedalaman informasi pada media yang diakses</li> <li>Sumber rujukan yang jelas pada media yang diakses</li> <li>Terdapat sumber berita pada media yang diakses</li> <li>Adanya ketepatan penggunaan ejaan kata dan tanda baca</li> <li>Kesesuaian judul dengan isi berita</li> <li>Kelengkapan unsur berita (5W+1H)</li> <li>Kejadian menyangkut hal-hal yang baru saja terjadi atau baru dikemukakan.</li> </ul>	

Variabel (Y)	Dimensi	Indikator	Skala
Tingkat Kepercayaan Publik Pada DPR-RI	Dimensi Integritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila</li> <li>• Terdapat tata kelola pemerintahan bersih, transparan dan akuntabel untuk menunjukkan komitmen integritas institusi negara.</li> <li>• Terdapat tata kelola pemerintahan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).</li> </ul>	Likert
	Dimensi Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengambil keputusan dengan cepat terhadap kebijakan</li> <li>• Dapat mengambil keputusan dengan tepat terhadap kebijakan</li> <li>• Akan selalu bekerja semaksimal mungkin</li> <li>• Dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang</li> <li>• Dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN</li> <li>• Pembuatan kebijakan telah sesuai dengan tujuan lembaga.</li> </ul>	
	Dimensi Loyalitas (Kesetiaan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan tugas secara disiplin, jujur dan menjaga citra baik lembaga.</li> <li>• Independen dalam bekerja serta menjalankan kode etik lembaga untuk menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas DPR</li> <li>• Dapat menjalankan amanat negara dengan penuh tanggung jawab.</li> </ul>	
	Dimensi Keterbukaan/transparansi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemudahan pencarian informasi dalam <i>website</i> atau media publikasi lembaga</li> <li>• Kemudahan pencarian informasi dalam media publikasi mengenai proses agenda kegiatan lembaga</li> <li>• Informasi mudah dipahami dan mudah diakses mengenai program kerja</li> <li>• Adanya laporan tahunan.</li> </ul>	

Sumber : Modifikasi oleh penulis, Desember 2017

### 3.5 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:117). Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Reguler S1 dan Diploma FISIP Universitas Lampung tahun akademik 2016 yang masih aktif. Dengan pemilihan populasi ini, diharapkan diperoleh informasi dari khalayak yang tepat pilih. Sebelumnya, penulis telah melakukan Pra-Riset dan mendapatkan populasi jumlah mahasiswa FISIP tahun akademik 2016 sebanyak 609 mahasiswa.

Terdiri dari 3 program studi Diploma III yaitu program studi Perpustakaan, program studi Administrasi Perkantoran dan Sekretari, program studi Hubungan Masyarakat, serta 6 program studi S1 yaitu program studi Hubungan Internasional, program studi Administrasi Bisnis, program studi Administrasi Negara, program studi Ilmu Komunikasi, program studi Ilmu Pemerintahan, program studi Sosiologi. Adapun perincian data populasi mahasiswa Reguler S1 dan Diploma FISIP Universitas Lampung tahun akademik 2016 sebagai berikut :

**Tabel 5. Daftar Mahasiswa S1 dan Diploma FISIP Universitas Lampung Tahun Akademik 2016/2017**

No.	Nama Jurusan	Jumlah
1.	Perpustakaan	22
2.	Sekretari	26
3.	Hubungan Masyarakat	33
4.	Hubungan Internasional	84
5.	Administrasi Bisnis	98
6.	Administrasi Negara	80
7.	Ilmu Komunikasi	105
8.	Ilmu Pemerintahan	90
9.	Sosiologi	71
<b>TOTAL</b>		<b>609</b>

Sumber: (Bidang Akademik Dekanat FISIP Universitas Lampung Bulan November 2017)



Peneliti menggunakan populasi ini, dikarenakan peneliti sedang melakukan studi di Universitas Lampung. Sehingga keterjangkauan tempat, mempermudah peneliti dalam mendapatkan data responden. Penelitian ini menggunakan mahasiswa angkatan 2016 karena pada angkatan tersebut mahasiswa masih aktif dalam masa studi perkuliahan sehingga keaktifan mahasiswa untuk hadir di kampus cukup tinggi dan pada angkatan tersebut pemberitaan dugaan kasus korupsi e-KTP ini sudah ramai diperbincangkan sehingga memungkinkan mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pemberitaan tersebut.

### **3.6 Sampel dan Teknik Sampling**

#### **3.6.1 Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2007:90). Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

#### **3.6.2 Teknik Pengambilan Sampling**

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 2004:73). Berdasarkan definisi diatas maka teknik sampling merupakan teknik untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Pemilihan sampel dengan metode yang tepat dapat menggambarkan kondisi populasi sesungguhnya

yang akurat, dan dapat menghemat biaya penelitian secara efektif. Idealnya, sampel haruslah benar-benar menggambarkan atau mewakili karakteristik populasi yang sebenarnya.

Dalam menentukan rancangan sampling, peneliti menggunakan metode *probability sampling*, yaitu peluang masing-masing responden dapat diketahui. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel berstrata proposional (*proportional stratified sampling*). Penentuan besaran sampel menggunakan rumus Stephen Isaac & William B. Michael.

**Tabel 6. Rumus Stephen Isaac & William B. Michael**

N	Signifikasi			N	Signifikasi		
	1%	5%	10%		1%	5%	10%
210	160	131	118	440	265	195	168
220	165	135	122	460	272	198	171
230	171	139	125	480	279	202	173
240	176	142	127	500	285	205	176
250	182	146	130	550	301	213	182
260	187	149	133	<b>600</b>	315	221	<b>187</b>
270	192	152	135	650	329	227	191

Sumber : (Burgin Burhan, 2007:92-93)

Penggunaan rumus ini, pertama ditentukan berapa batas toleransi kesalahan. Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan persentase. Semakin kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Pada penelitian ini populasi sebanyak 609 mahasiswa dengan taraf kesalahan sebesar 10%. Maka sampel yang didapat dari mahasiswa reguler S1 dan Diploma FISIP Universitas Lampung tahun akademik 2016 berjumlah 187 orang mahasiswa.

Metode pemilihan sampel yang digunakan peneliti adalah *probability sampling*, dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel berstrata

proposional (*proportional stratified sampling*) dimana sampel diambil secara proposional sebagai berikut :

**Tabel 7. Distribusi Responden Berdasarkan Fakultas**

No.	Nama Jurusan	Rumus	Hasil
1.	Perpustakaan	$22 / 609 \times 187 = 6,7$	7
2.	Sekretari	$26 / 609 \times 187 = 7,9$	8
3.	Hubungan Masyarakat	$33 / 609 \times 187 = 10$	10
4.	Hubungan Internasional	$84 / 609 \times 187 = 25,7$	26
5.	Administrasi Bisnis	$98 / 609 \times 187 = 30$	30
6.	Administrasi Negara	$80 / 609 \times 187 = 24,5$	25
7.	Ilmu Komunikasi	$105 / 609 \times 187 = 32$	32
8.	Ilmu Pemerintahan	$90 / 609 \times 187 = 27$	27
9.	Sosiologi	$71 / 609 \times 187 = 21,8$	22
<b>TOTAL</b>			<b>187</b>

Sumber: (Olahan Bidang Akademik Dekanat FISIP Universitas Lampung Bulan November 2017 dan perhitungan berdasarkan rumus)

### 3.7 Sumber Data

Menurut Siregar (2013:16) jenis data dikelompokkan berdasarkan jenis dan posisinya, mulai dari yang paling nyata sampai dengan yang paling samar-samar, dan mulai dari yang paling terlibat sampai dengan yang bersifat sekunder. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui jawaban responden terhadap daftar pertanyaan melalui kuesioner telah disiapkan oleh peneliti.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, foto dan sumber lainnya (Sugiyono, 2007:137).

### **3.8 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan :

- a. Kuesioner, dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2010:194).
- b. Studi kepustakaan, teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data tambahan dari berbagai referensi berupa buku, arsip, agenda, dokumen, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **3.9 Teknik Pengolahan Data**

Setelah mengumpulkan data dari lapangan, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Editing, adalah proses pengecekan atau memeriksa data yang telah berhasil dikumpulkan dari lapangan, karena ada kemungkinan data yang telah masuk tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan.
2. Koding, adalah kegiatan pemberian kode tertentu pada tiap-tiap data yang termasuk kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf untuk membedakan antara data atau identitas data yang akan dianalisis.
3. Tabulasi, adalah proses penempatan data kedalam bentuk tabel yang telah diberi kode sesuai dengan kebutuhan analisi. Tabel-tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas agar memudahkan dalam proses analisis data (Siregar, 2013:86).

### **3.10 Teknik Pemberian Skor**

Kriteria pengukuran dan pemberian skor dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan skala Likert, yaitu responden dihadapkan dengan pernyataan dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Masing-masing alternatif jawaban diberi skor 1-5. Skala Likert dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi sekelompok orang mengenai suatu fenomena. Setiap pertanyaan dalam kuesioner akan diberi lima alternatif jawaban, yaitu A, B, C, D, dan E. Penentuan skor untuk masing-masing alternatif jawaban adalah :

1. Alternatif jawaban (a), diberi skor 5, menunjukkan kategori sangat tinggi
  2. Alternatif jawaban (b), diberi skor 4, menunjukkan kategori tinggi
  3. Alternatif jawaban (c), diberi skor 3, menunjukkan kategori sedang
  4. Alternatif jawaban (d), diberi skor 2, menunjukkan kategori rendah
  5. Alternatif jawaban (e), diberi skor 1, menunjukkan kategori sangat rendah
- (Sugiyono, 2011:121).

### **3.11 Teknik Pengujian Instrumen**

Untuk mendapatkan kebenaran data, maka instrumen harus memenuhi persyaratan. Instrumen yang baik dalam penelitian harus memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan reliabel, instrumen harus melalui tahap uji validitas dan realibilitas sebagai berikut:

#### **3.11.1 Uji Validitas**

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan mengukur

apa yang seharusnya di ukur (Sugiyono, 2007:172). Pengujian validitas dilakukan dengan analisis faktor, dimana menurut Sugiyono adalah dengan mengkorelasikan antar skor item instrumen dalam satu faktor, dan mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. Adapun kriteria yang harus di penuhi untuk menilai validitas instrumen tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka butir-butir pernyataan dari kuesioner adalah valid.
- b. Jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka butir-butir pernyataan dari kuesioner adalah tidak valid.

Rumus korelasi *Person Product Moment* :

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x) (\sum y)}{\sqrt{\{N \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{N \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  : koefisien korelasi antara x dan y  $r_{xy}$

N : Jumlah Subyek

X : Skor item

Y : Skor total

X : Jumlah skor items

Y : Jumlah skor total

$X^2$  : Jumlah kuadrat skor item

$Y^2$  : Jumlah kuadrat skor total

(Arikunto, 2010:211-213).

Uji validitas dalam penelitian ini mengambil populasi mahasiswa Universitas Bandar Lampung (UBL) angkatan 2016. Pengujian instrumen terhadap 30

responden diperoleh hasil sebanyak 98 pertanyaan dan pernyataan kuesioner penelitian yang diuji validitasnya dengan nilai koefisien di atas nilai R Tabel yaitu (0,361) dengan taraf signifikansi 5% terdapat 83 pertanyaan dan pernyataan yang dinyatakan valid sedangkan 15 pertanyaan dan pernyataan tidak valid. Sejumlah 15 item pertanyaan dan pernyataan yang tidak valid pada kuesioner yang telah dilakukan uji validitas diputuskan untuk dihapus karena hasil R Hitung < R Tabel (0,361) dan tidak mempengaruhi setiap indikator utama serta telah terwakilkan oleh indikator utama lainnya (data dapat dilihat pada BAB V tabel 8 halaman 88).

### 3.11.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan bahwa *instrument* yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat ukur data karena *instrument* tersebut sudah baik. (Arikunto, 2010:221). Kuesioner dikatakan reliabel jika dapat memberikan hasil relatif sama pada saat dilakukan pengukuran kembali pada objek yang berlainan pada waktu yang berbeda atau memberikan hasil yang tetap.

Untuk menguji tingkat reliabilitas, digunakan rumus *Cronbach's Alpha* yaitu :

$$r_{11} = \left[ \frac{k}{k-1} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan :

$r_{11}$  : Nilai Reliabilitas

$k$  : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

$\sum \sigma_b^2$  : Jumlah varians butir

$\sigma_t^2$  : Variansi total

Apabila koefisien Cronbach Alpha ( $r_{11}$ ) > R Tabel (0,60) maka dapat dikatakan instrumen tersebut reliabel (Arikunto, 2006:154).

### 3.12 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain yang terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah dengan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang tengah diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2010:207). Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Rumus regresi linier adalah sebagai berikut:

$$y = a + bx$$

Keterangan:

y : nilai variabel bebas yang diramalkan

a : konstanta

b : koefisien regresi dari x

x : nilai variabel terikat yang diramalkan

Sedangkan untuk mencari nilai a dan b digunakan rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{(\sum y) (\sum x^2) - ((\sum x) (\sum xy))}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{[\sum xy - (\sum x) (\sum y)]}{n (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$



Keterangan:

y : Jumlah skor dari variabel terikat

x : Jumlah skor akhir dari variabel bebas

n : Jumlah sampel

(Sugiyono, 2002: 221)

### **3.13 Pengujian Hipotesis**

#### **3.13.1 Uji F**

Dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat signifikansi dari koefisien korelasi dengan menggunakan statistik Uji “F”. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Y). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F Hitung dengan F Tabel pada derajat kesalahan 5% ( $\alpha = 0,05$ ).

Ketentuan yang dipakai untuk menarik kesimpulan ini adalah:

- a. Apabila nilai F Hitung  $>$  dari nilai F Tabel atau nilai sig  $< 0,05$  (*alpha*) maka variabel bebasnya secara simultan memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat dan hipotesis pertama ditolak serta hipotesis kedua diterima.
- b. Apabila nilai F Hitung  $<$  dari nilai F Tabel atau nilai sig  $> 0,05$  (*alpha*) maka variabel bebasnya secara simultan tidak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat dan hipotesis pertama diterima serta hipotesis kedua ditolak.

Rumus F Hitung (Sugiyono, 2014:192) sebagai berikut:

$$f = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan:

$R^2$  = Koefisien korelasi ganda

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah sampel

Kekuatan hubungan antar variabel yang menunjukkan derajat hubungan yaitu korelasi (r) dapat dikategorikan sebagai berikut :

<0,20	Hubungan rendah sekali; lemah sekali
0,20 - 0,39	Hubungan rendah tetapi pasti
0,40 - 0,70	Hubungan yang cukup berarti
0,71 - 0,90	Hubungan yang tinggi; kuat
>0,90	Hubungan yang sangat tinggi; kuat sekali; dapat diandalkan

(Kriyantono, 2006:173).

### 3.13.2 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji  $R^2$  (uji determinasi) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Ketika nilai  $R^2$  semakin besar (mendekati satu) menunjukkan semakin baik kemampuan variabel X menerangkan variabel Y dimana  $0 < R^2 < 1$ . Sebaliknya, ketika  $R^2$  semakin kecil (mendekati nol), maka akan dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas adalah kecil terhadap variabel terikat. Hal ini berarti model yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2014:258).

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **4.1 Gambaran Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung mulai melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 90/KPTS/R/1983 tanggal 28 Desember 1983 tentang panitia pendirian persiapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Disusul kemudian tanggal 21 Agustus 1984 terbit Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor: 103/DIKTI/Kep/1984 tentang jenis dan jumlah program studi setiap jurusan di lingkungan Universitas Lampung.

SK Dirjen Dikti inilah yang mengukuhkan keberadaan Program Studi Sosiologi dan Program Studi Ilmu Pemerintahan yang berada dalam lingkungan Fakultas Hukum sebagai induk persiapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oleh karena itu mulai tahun akademik 1985/1986, persiapan FISIP Unila menerima mahasiswa baru melalui jalur penelusuran minat dan kemampuan (PMDK) dan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru (SIPENMARU). Kepanitiaan pendirian FISIP ini disempurnakan dengan SK Rektor Unila Nomor: 85/KPTS/R/1986 tanggal 22 Oktober 1986 tentang Panitia Pembukaan Persiapan FISIP Unila.

Panitia Persiapan ini dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Lampung. Tugas panitia ditegaskan dengan SK Rektor Unila Nomor: 111/KPTS/R/1989 tanggal 29 Desember 1989, bahwa panitia bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan:

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran;
- 2) Penelitian dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi;
- 3) Pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Pembinaan sivitas akademika;
- 5) Kegiatan pelayanan administrasi.

Adapun Ketua Persiapan FISIP Universitas Lampung adalah sebagai berikut:

- 1) Drs. A. Kantan Abdullah : 1985-1991
- 2) Drs. Abdul Kadir, M.S. : 1991-1997

FISIP Unila resmi berdiri sebagai fakultas berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 15 Nopember 1995 Nomor: 0333/O/1995 tentang Pembukaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. FISIP terdiri dari dua program studi yaitu Program Studi Sosiologi dan Program Studi Ilmu Pemerintahan. Berdasarkan SK Dirjen Dikti, Depdikbud RI Nomor: 37/DIKTI/Kep/1997 tanggal 27 Pebruari 1997 maka status Program Studi tersebut ditingkatkan menjadi Jurusan. Pada tanggal 18 Maret 1997 terbit Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor: 49/DIKTI/Kep/1997 tentang Pembentukan Program Studi Ilmu Komunikasi.

Dalam rangka memenuhi harapan masyarakat akan ketersediaan tenaga-tenaga terampil siap pakai, mulai tahun akademik 1998/1999 FISIP membuka Program

Diploma III (Keputusan Dirjen Dikti Nomor: 211/DIKTI/Kep/1998): Program Studi Administrasi Perkantoran dan Sekretari, Program Studi Hubungan Masyarakat (Humas), dan Program Studi Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi (Keputusan Dirjen Dikti Nomor: 3953/D/T/Kep/2001) serta membuka Program Ekstensi/Nonreguler (S.1) berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti nomor 28/DIKTI/Kep/2002 dan Keputusan Rektor Unila nomor 4596/J26/PP/2003, yaitu Program Studi Sosiologi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, dan Program Studi Ilmu Komunikasi. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1998 terbit Keputusan Dirjen Dikti Nomor: 212/DIKTI/Kep/1998, tentang Pembentukan Program Studi Strata 1 (reguler): Ilmu Administrasi Negara dan Program Studi Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis. Pada tanggal 8 oktober 2012 terbit keputusan mendikbud nomor: 352/E/2012, tentang Pembentukan program Studi Strata 1 (regular): Ilmu Hubungan Internasional.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 2158A.2.1.2/KP/1997, tanggal 23 Januari 1997 diangkat Drs. M. Sofie Akrabi, M.A. Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang pertama. Adapun masa kepemimpinan di FISIP Unila adalah:

- 1) Dekan Periode 1997-2000 : Drs. M. Sofie Akrabi, M.A.
- 2) Dekan Periode 2000-2004 : Prof. Dr. Bambang Sumitro, M.S.
- 3) Dekan Periode 2004-2008 : Drs. Hertanto, M.Si.
- 4) Dekan Periode 2008-2012 : Drs. Agus Hadiawan, M.Si.
- 5) Dekan Periode 2012-2016 : Drs. Agus Hadiawan, M.Si.
- 6) Dekan Periode 2016-2020 : Dr. Syarief Makhya, M.Si

#### 4.1.2 Filosofi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) berpedoman kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan-peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi. FISIP Universitas Lampung dalam menyelenggarakan program-programnya berpedoman kepada Statuta Universitas Lampung, yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 182/O/2002 tanggal 21 Oktober 2002. Kebijakan Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan ketertarikan dan kesepadanan antara pendidikan dan penelitian dengan perkembangan pembangunan nasional juga dijadikan sebagai arah. Acuan lain adalah isu-isu utama program pendidikan yang tertuang di dalam Kerangka Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPTJP) III, sebagai pengejawantahan paradigma baru pendidikan tinggi di Indonesia.

Untuk melandasi kegiatan Tri Dharmanya, telah dirumuskan filosofi FISIP Universitas Lampung. Filosofi memberikan dasar pertimbangan dalam memilih alternatif, gerak, dan langkah yang berdasarkan kepada keyakinan dasar yang telah dicanangkan. Filosofi FISIP Universitas Lampung sebagai berikut:

- 1) Berorientasi kepada kepuasan pelanggan (*customer*)
- 2) Bertumpu pada organisasi dan manajemen yang professional
- 3) Berupa peningkatan kualitas secara berkelanjutan (*continouse quality improvement*)
- 4) Bekerja berdasarkan perencanaan *top down – bottom up*
- 5) Lingkungan kerja yang kondusif

### **4.1.3 Visi, Misi dan Tujuan FISIP Universitas Lampung**

#### **4.1.3.1 Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**

Visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung merupakan perwujudan Visi Unila di bidang Ilmu Sosial. Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran melibatkan seluruh unsur pengelola (Dekan dan jajarannya, Kepala/sub. Bagian Administrasi), Jurusan, Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni dan pemangku kepentingan lainnya. Rumusan visi misi didasarkan pada analisis kekuatan (*strengths*), dan kelemahan (*weaknesses*), yang dimiliki unit pengelola tantangan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi baik dari sumber-sumber internal maupun eksternal. Melalui proses penyusunan yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan (*stakeholder*) ini diharapkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang disusun dapat dipahami, dihayati dan menjadi semangat penggerak bersama dalam mencapai cita-cita masa depan yang telah dirumuskan dalam visi dan misi.

Pencapaian visi dan misi tersebut selalu dipantau dan dievaluasi secara berkala sehingga dapat dilakukan penajaman program kegiatan dalam rangka menjamin pencapaian visi dan misi tersebut. Program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi disusun dalam bentuk program/kegiatan jangka panjang dan jangka pendek. Penyusunan program dan kegiatan ini dilakukan melalui forum rapat kerja yang melibatkan unsure pimpinan baik akademik maupun administrasi.

FISIP Universitas Lampung menetapkan visi sebagai berikut: “Pada Tahun 2025, terwujudnya FISIP Unila menjadi Lembaga Pendidikan dan Pusat Pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sepuluh Terbaik di Indonesia”. Visi FISIP Unila tersebut menggambarkan cita-cita atau keadaan yang diharapkan dimasa yang akan datang, yaitu pada tahun 2025. Jadi visi fakultas telah dinyatakan dengan jelas, sangat realistis dan dapat dicapai secara bertahap dalam bentuk program baik jangka pendek maupun jangka panjang.

#### **4.1.3.2 Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**

Adapun Misi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu sosial dan politik dalam rangka menghasilkan lulusan yang menguasai ipteks, berintegritas tinggi dan berdaya saing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu sosial dan politik untuk mendukung pendidikan dan pengabdian pada masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis kearifan lokal untuk mendukung masyarakat madani yang harmonis dan sejahtera.
- 4) Menyelenggarakan organisasi dan tata kelola yang baik yang berorientasi pada mutu dan kemampuan bersaing.
- 5) Menyelenggarakan kerjasama dengan *skateholders* ditingkat lokal, nasional, dan internasional.



### **4.1.3.3 Tujuan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung**

Tujuan penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi di FISIP Unila adalah:

- 1) Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ipteks di bidang ilmu sosial dan politik dan memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah sosial dan politik baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional.
- 2) Menghasilkan penelitian di bidang ilmu sosial dan politik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi rujukan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.
- 3) Menghasilkan pengabdian masyarakat yang mendorong masyarakat madani yang harmonis dan sejahtera.
- 4) Mewujudkan fakultas dengan tata kelola yang baik, bermutudan berdaya saing.
- 5) Menghasilkan *memorandum of understanding (MOU)* sebagai acuan kerjasama berkesinambungan dan yang saling menguntungkan.

## **4.2 Gambaran Umum E-KTP**

### **4.2.1 Deskripsi Tentang E-KTP**

E-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum nomor induk kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, surat izin mengemudi (SIM), nomor pokok wajib

pajak (NPWP), polis asuransi, sertifikat atas hak tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk).

Autentikasi kartu identitas (*e-ID*) biasanya menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari (*fingerprint*), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada e-KTP, yang digunakan adalah sidik jari.

Penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM (surat izin mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui *chip* yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkrpsi dengan algoritma kriptografi tertentu. Proses pengambilan sidik jari dari penduduk sampai dapat dikenali dari *chip* kartu adalah sebagai berikut:

Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk e-KTP karena alasan berikut:

1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain
2. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula
3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar.

Informasi penduduk yang dicantumkan dalam e-KTP ditunjukkan pada layout kasar berikut:

1. Nama
2. Tempat/Tgl Lahir
3. Jenis Kelamin
4. Alamat (RT/RW, Kel/Desa, Kecamatan)
5. Agama
6. Status Pekerjaan
7. Kewarganegaraan
8. Berlaku Hingga
9. Foto
10. Tanda Tangan
11. NIK

Untuk mendapatkan informasi di atas dari penduduk, wajib KTP harus mengisi formulir tipe F1.01. Selain tujuan yang hendak dicapai, manfaat e-KTP diharapkan dapat dirasakan sebagai berikut:

1. Identitas jati diri tunggal
2. Tidak dapat dipalsukan
3. Tidak dapat digandakan
4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada

Struktur e-KTP terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional. *Chip* ditanam di antara plastik putih dan transparan pada dua layer teratas (dilihat dari depan). *Chip* ini memiliki antena didalamnya yang

akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat pendeteksi e-KTP sehingga dapat diketahui apakah KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak. Untuk menciptakan e-KTP dengan sembilan *layer*, tahap pembuatannya cukup banyak, diantaranya:

1. *Hole punching*, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip
2. *Pick and pressure*, yaitu menempatkan *chip* di kartu
3. *Implanter*, yaitu pemasangan antenna (pola melingkar berulang menyerupai spiral)
4. *Printing*, yaitu pencetakan kartu
5. *Spot welding*, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik
6. Laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman e-KTP dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti *relief text*, *microtext*, *filter image*, *invisible ink* dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta anti *copy design*.

Penyimpanan data di dalam *chip* sesuai dengan standar internasional NISTIR 7123 dan *Machine Readable Travel Documents ICAO 9303* serta *EU Passport Specification 2006*. Bentuk KTP elektronik sesuai dengan ISO 7810 dengan *form factor* ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm.

#### **4.2.2 Dasar Hukum E-KTP**

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736).
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional;

#### **4.2.3 Kelebihan E-KTP**

Berdasarkan pernyataan menteri dalam negeri Gamawan Fauzi di situs resmi e-KTP, kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang diterapkan di Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan dengan e-KTP yang diterapkan di RRC dan India. e-KTP di Indonesia lebih komprehensif. Di RRC, Kartu identitas elektronik (*e-IC*) nya tidak dilengkapi dengan biometrik atau rekaman sidik jari. Di sana, *e-IC* hanya dilengkapi dengan *chip* yang berisi data perorangan yang terbatas. Sedang di India, sistem yang digunakan untuk pengelolaan data kependudukan adalah sistem UID (*Unique Identification Data*), sedangkan di Indonesia namanya NIK (nomor induk kependudukan). UID diterbitkan melalui pendaftaran pada 68 titik pelayanan, sedangkan program e-KTP di Indonesia dilaksanakan di lebih dari

6.214 kecamatan. Dengan demikian, e-KTP yang diterapkan di Indonesia merupakan gabungan *e-ID* RRC dan UID India, karena e-KTP dilengkapi dengan biometrik dan *chip*.

E-KTP juga mempunyai keunggulan dibandingkan dengan KTP biasa / KTP nasional, keunggulan-keunggulan tersebut diantaranya:

1. Identitas jati diri tunggal
2. Tidak dapat dipalsukan
3. Tidak dapat digandakan
4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam Pemilu atau Pilkada (*E-voting*).

Selain itu, sidik jari yang direkam dari setiap wajib e-KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk e-KTP karena memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut:

1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain
2. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores
3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar.

#### **4.2.4 Kekurangan E-KTP**

Selain mempunyai banyak kelebihan, sayangnya E-KTP ini juga terdapat beberapa kekurangan, yaitu:

1. Tidak terintegrasi dengan layanan publik lainnya (seperti SIM, kartu kesehatan dan lainnya) sehingga tetap dipakai seperti KTP konvensional.

2. E-KTP tidak boleh sering difotokopi. E-KTP juga tak boleh sering-sering menekannya dengan heter dikarenakan akan merusak *chip* yang ada di e-KTP tersebut.
3. Tidak ada alat yang *standby* di kelurahan, sehingga jika ada kerusakan atau salah tulis, warga harus menunggu berbulan-bulan bahkan ujung-ujungnya diganti KTP konvensional dulu
4. Tidak bisa digunakan untuk transaksi di perbankan karena tidak ada stempel kelurahan setempat.
5. Rawan pencurian data kependudukan, sehingga mengancam pribadi, bahkan bangsa sadan negara.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto di media terhadap tingkat kepercayaan publik pada DPR-RI (studi pada mahasiswa FISIP Universitas Lampung angkatan 2016), maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian mengenai pengaruh pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto di media terhadap tingkat kepercayaan publik pada DPR-RI menunjukkan hasil  $F_{\text{Hitung}} \geq F_{\text{Tabel}}$  yaitu  $9.020 \geq 3,89$  pada taraf signifikansi 5%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini berarti, ada pengaruh pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto di media terhadap tingkat kepercayaan publik pada DPR-RI.
2. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah 0,046. Angka tersebut memiliki arti bahwa tingkat kepercayaan publik pada DPR-RI dipengaruhi oleh pemberitaan kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto di media hanya sebesar 4,6%. Sisanya 95,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberitaan



kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto di media memiliki pengaruh sangat rendah terhadap tingkat kepercayaan publik pada DPR-RI

## **6.2 Saran**

Saran penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi pemilik media massa untuk lebih meningkatkan kualitas informasi karena sangat mempengaruhi berkembangnya opini publik terhadap pesan yang disebarkan. Untuk pengguna media massa agar bijak dalam mengakses informasi melalui media, memilah dan menyaring pesan, menjadikan informasi yang dibaca sebagai pengetahuan dan pengalaman baru untuk terus belajar.
2. Diharapkan bagi para wakil rakyat atau orang-orang yang duduk di lembaga negara, untuk menjaga integritas lembaga masing-masing dan menjalankan kode etik, menjaga martabat, kehormatan dan kredibilitas lembaga masing-masing dalam melaksanakan tugas secara amanah, disiplin, jujur serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

## DAFTAR PUSTAKA

- Alo, Liliweri. 2004. *Wacana Komunikasi Organisasi*. Mandar Maju: Bandung.
- Anwar, Arifin. 2013. *Perspektif Ilmu Politik*. Pustaka Indonesia: Jakarta.
- Ardianto, Elvinaro. 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Simbosa Rekatama Media: Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Ar. Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Lembaga Administrasi Negara: Jakarta.
- Aziz Alimul, Hidayat. 2007. *Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data*. Salemba Medika: Jakarta.
- Bimo Walgito. 2002. *Pengantar Psikologi Umum*. Andi Offset: Yogyakarta.
- Burgin, M. Burhan. 2007. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Cangara, Hafied. 2003. *Pengantar Ilmu Komunikasi (Cetakan Keempat)*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 2016. *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi Edisi Revisi 2016*. PT. Raja grafindo Persada: Jakarta.
- Devano, Sony, Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Konsep, teori dan Isu*. Kencana: Jakarta.
- Djuraid, N. Husnun. 2006. *Panduan Menulis Berita*. Penerbit Universitas Muhammadiyah: Malang.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Framanik, Naniek Aprilla. 2012. *Komunikasi Persuasi*. Kocipta Publishing. Serang.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana: Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 2007. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana: Jakarta.
- Kusumaningrat, Purnama. 2005. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Rosdakarya: Jakarta.
- Lalolo krina, Loina. 2003. *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta.
- Luwi, Ishwara. 2005. *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*. Kompas: Jakarta.
- Mar'at. 1982. *Remaja dan Interaksi Sosial Teman Sebaya*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Morissan. 2008. *Jurnalistik Televisi Mutakhir*. Media Grafika 77: Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 2014. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Kencana Prenadamedia Group: Jakarta.
- Muttaqien. 2016. *Trust dalam Komunikasi*. *Makalah: PPs UINSU (S3)*. UINSU: Medan.
- Nurudin. 2009. *Pengantar Komunikasi Massa*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Pawito. 2008. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. LKIS Pelangi Aksara: Yogyakarta.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2007. *Metode Penelitian Komunikasi*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- \_\_\_\_\_ 2011. *Psikologi Komunikasi*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Robbins, Stephen P., Judge, Timothy A. 2008. *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Setiati, Eni. 2005. *Ragam Jurnalistik Baru Dalam Pemberitaan*. Andi Offset: Yogyakarta.

- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3S: Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 2001. *Metode Penelitian Survey*. PT. LB3ES: Jakarta.
- Siregar, Ashadi. 1998. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita Untuk Media Massa*. Penyunting Rondang Pasaribu, Kanisius: Yogyakarta.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. PRENADA MEDIA GROUP: Jakarta.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. CV Alfabeta: Bandung.
- \_\_\_\_\_ 2007. *Metode Penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- \_\_\_\_\_ 2010. *Metode Penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- \_\_\_\_\_ 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sumadiria, Haris. 2006. *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature*. Simbiosis Rekatama Media: Bandung.
- Tamburaka, Apriadi. 2003. *Literasi Media*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Zulkarnain, Iskandar. 2016. *Kepercayaan Dalam Komunikasi Politik: Tinjauan Psikologi*. USU Press: Medan.

### **Sumber Skripsi :**

- Nada Rohmah. 2015. *Pengaruh Pemberitaan Penangkapan Bambang Widjojanto di Metro TV Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Citra KPK (Survei Terhadap Mahasiswa Aktifis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.  
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30151/1/NADA%20ROHMAH-FDIKOM.pdf> diakses pada 2 Desember 2017.
- Luknia Sari Putri. 2012. *Pengaruh Terpaan Media Televisi Dalam Pembentukan Citra Kepolisian (Survei pada Penonton Acara Televisi 86 Net TV Di Dusun Pungkursari Sidorejo Salatiga)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
<http://digilib.uin-suka.ac.id/24747/> diakses pada 2 Desember 2017.

Listianto Hindra Pramono. 2013. *Hubungan Terpaan Pemberitaan Korupsi di Televisi dan Pernyataan Presiden SBY di Televisi dengan Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah*. Universitas Diponegoro. <https://ejournal3.undip.ac.id> diakses pada 2 Desember 2017.

Ainurrofiq. 2007. *Pengaruh Dimensi Kepercayaan (Trust) Terhadap Partisipasi Pelanggan E-Commerce (Studi Pada Pelanggan E-Commerce Di Indonesia)*. Universitas Brawijaya. [http://ainurrofiq.lecture.ub.ac.id/files/2012/03/tesis\\_ainurrofiq\\_dimensi\\_trus t.pdf](http://ainurrofiq.lecture.ub.ac.id/files/2012/03/tesis_ainurrofiq_dimensi_trus t.pdf) diakses pada 2 Desember 2017.

### **Sumber Internet :**

<http://news.metrotvnews.com/hukum/ObzWL47k-setya-novanto-tersangka-baru-ktp-elektronik> (diakses pada 22 November 2017).

<http://nasional.kompas.com/read/2017/09/30/08450451/kronologi-novanto-tersangka-hingga-status-tersangkanya-dibatalkan> (diakses pada 22 November 2017).

<https://www.jawapos.com/read/2017/11/16/168770/sepak-terjang-novanto-lolos-penetapan-tersangka-hingga-dijemput-paksa> (diakses pada 22 November 2017).

<http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/12/17/50737/25/25/LSI-Kepercayaan-Publik-Terhadap-DPR-di-Titik-Terendah-Akibat-Papa-Minta-Saham> (diakses pada 22 November 2017).

<https://nasional.tempo.co/read/893107/survei-polling-center-kepercayaan-ke-kpk-tinggi-ke-dpr-rendah> (diakses pada 22 November 2017).

<http://nasional.kompas.com/read/2017/09/12/22453771/kepercayaan-terhadap-dpr-rendah-para-wakil-rakyat-diminta-berkaca> (diakses pada 22 November 2017).

<http://kbbi.web.id/pemberitaan> (diakses pada 2 Desember 2017).

<http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang> (diakses pada 22 November 2017).

<http://fisip.unila.ac.id/> (diakses pada 22 April 2018 pukul 20.00).

<http://satulayanan.id/layanan/index/17/e-ktp/kemendagri#> (diakses pada 22 April 2018 pukul 20.00).

Ivan Muhammad Agung, Masyhuri, Hidayat. 2013. *Dinamika Ketidakpercayaan terhadap Politisi : Suatu Pendekatan Psikologi Indigenous*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau : Fakultas Psikologi. Diakses melalui: <http://repository.uin-suska.ac.id/6193/3/BAB%20II.pdf> (diakses pada 22 April 2018 pukul 21.00).

Kovacic, Melita Poler, dkk. 2010. *Credibility of Traditional vs. Online New Media: A Historical Change in Journalists' Perceptions*. Diakses melalui: <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEmLHNho7MAhXEq5QKHUTbDXkQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fhrca.srce.hr%2Ffile%2F88479&usg=AFQjCNF8AWwBk58VCoRWgES4khlb4HsOmg&bvm=bv.119408272,d.dGo> (diakses pada 22 November 2017).

Metzger, Miriam J. dan Andrew J. Flanagin. 2013. *Credibility and Trust of Information in Online Environments: The Use of Cognitive Heuristics*. California: Departement of Communication, University of California, Santa Barbara. Diakses melalui: <https://pdfs.semanticscholar.org/d61b/8f7869ebe18d35e35015066003948c364789.pdf> (diakses pada 22 November 2017).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN).